



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants



PENGEMBANGAN

SAK

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

&

SPK

STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN

2025



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Institute of Indonesia Chartered Accountants

- 1 Filosofi lingkaran pada simbol IAI memiliki arti keseluruhan, penyatuan, kebersamaan dan keberlanjutan.
- 2 Bentuk lingkaran menunjukkan IAI sebagai wadah pemersatu seluruh akuntan di Indonesia.
- 3 Tulisan IAI di tengah lingkaran mencerminkan profesi akuntan yang kuat dan bermartabat.
- 4 Warna biru pada lingkaran dan sekeliling tulisan IAI mencerminkan integritas dan profesionalisme akuntan.
- 5 Warna merah pada tulisan IAI mencerminkan akuntabilitas dan kredibilitas akuntan Indonesia.

Riwayat Singkat

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam Bahasa Inggris adalah *Institute of Indonesia Chartered Accountants*. IAI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957, dilandasi semangat kebangsaan Akuntan Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia untuk memikirkan kualitas dan pengembangan profesi akuntan Indonesia.

Pendiri & Pengurus IAI Pertama Kali

Ketua:

Prof. R. Soemarjo Tjitrosidojo

Panitera:

Drs. Go Tie Siem

Bendahara:

Sie Bing Tat (Drs. Basuki T. Siddharta)

Komisaris:

Dr. Tang Tong Joe & Drs. Oey Kwie Tek
(Drs. Hendra Darmawan)

Anggota Pendiri Lainnya:

Prof. Aboetari, Tio Po Tjang, Tan Eng Oen,
Tang Siu Tjhan, Liem Kwie Liang,
The Tik Kim, Drs. B.P Hoetapea,
Drs. Soedarmin, Drs. Koe Tjien Hong

Tujuan Pendirian IAI adalah

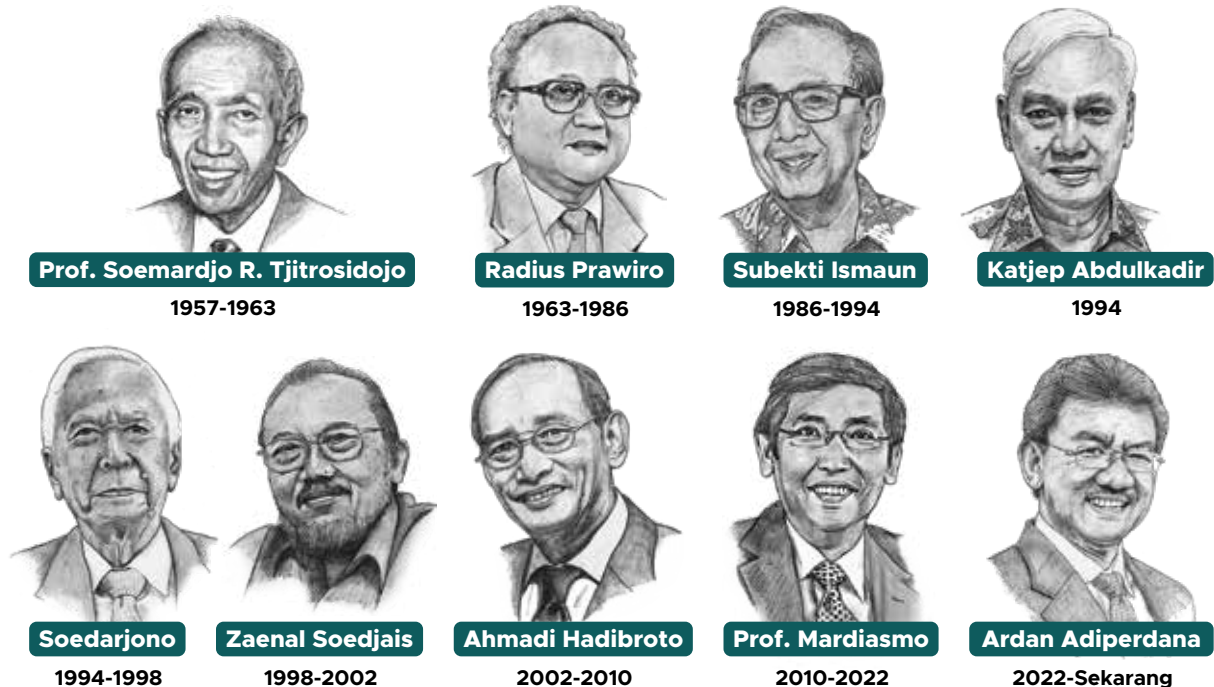
1

Membimbing
Perkembangan Akuntansi
serta *Mempertinggi Mutu Pendidikan* Akuntan

2

Mempertinggi Mutu Pekerjaan Akuntan

Ketua IAI dari Masa ke Masa



IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan syariah, akuntan berpraktik yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan, dan lainnya. Saat ini IAI telah lengkap memiliki perwakilan di 34 provinsi di Indonesia.

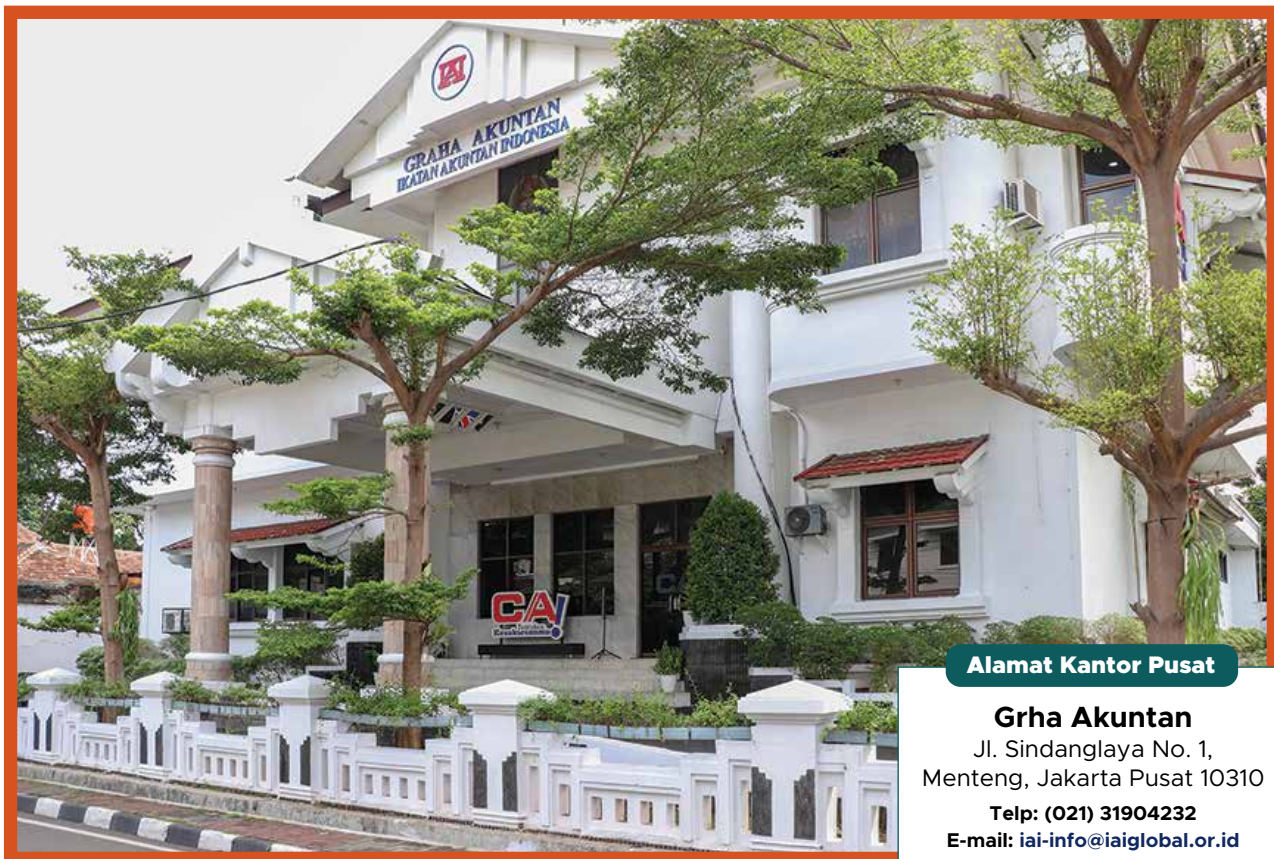
Anggaran Dasar IAI memuat maksud, tujuan dan fungsi IAI saat ini, yaitu menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didarmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdian untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.

Anggaran Dasar IAI yang pertama disahkan Menteri Kehakiman pada 11 Februari 1959 melalui Daftar Penetapan Menteri Kehakiman RI No. J.A.5/13/16 tanggal 11 Pebruari 1959, dan telah diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah yang ditetapkan pada Kongres XIII IAI tanggal 13 Desember 2018 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020, dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000789. AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Informasi Umum

IAI diakui sebagai salah satu pendiri dan anggota **International Federation of Accountants (IFAC)** tanggal 7 Oktober 1977. IAI juga merupakan pendiri dan anggota **ASEAN Federation of Accountants (AFA)** tanggal 7 Maret 1977. IAI bergabung sebagai *associate member* **Chartered Accountants Worldwide (CAW)** pada tanggal 1 Agustus 2016.



Alamat Kantor Pusat

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya No. 1,
Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp: (021) 31904232

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Website: www.iaiglobal.or.id

Media Sosial



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



Fanpage: [Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



WA Official IAI

08 111 055 141

Visi & Misi



VISI

Menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.



MISI

- ① Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab, dan lingkungan hidup.
- ② Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat.
- ③ Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan *good governance* melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.

Maksud, Tujuan & Fungsi

- ① IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- ② IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didarmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara.
- ③ IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjebatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdian untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.

Peran & Tanggung Jawab



1

Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pelayanan keanggotaan



2

Menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi akuntan



3

Menyusun Standar Akuntansi Keuangan



4

Menyelenggarakan sertifikasi akuntan berkualitas



5

Menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan



6

Menerapkan penegakan disiplin untuk anggota



7

Berkontribusi dalam penguatan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola laporan keuangan di sektor publik, swasta, entitas mikro, kecil dan menengah



8

Mengembangkan profesi akuntan di Indonesia secara keseluruhan

IAI sebagai asosiasi profesi akuntan pertama dan terbesar di Indonesia saat ini menaungi lebih dari 31 ribu anggota. IAI merupakan anggota dan salah satu pendiri *International Federation of Accountants* (IFAC), organisasi profesi akuntan sedunia yang merepresentasikan lebih 3,5 juta akuntan yang bernaung dalam 180 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 135 negara. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan, demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia.

IAI bergabung menjadi anggota *Chartered Accountants Worldwide* (CAW) sebagai wujud pengakuan global atas kualifikasi *Chartered Accountant* (CA) Indonesia yang diterbitkan IAI. CAW terdiri dari 12 asosiasi profesi yang mewakili 1,7 juta akuntan pemegang sebutan CA di dunia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri *ASEAN Federation of Accountants* (AFA). Saat ini IAI menjadi sekretariat permanen AFA sejak tahun 2011.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Bergister Negara yang selanjutnya digantikan dengan PMK Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Bergister sebagai panduan teknis atas UU Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian Gelar “Akuntan” (“*Accountant*”), tanggungjawab IAI dalam penataan dan pengembangan profesi akuntan diperkuat dengan penetapan IAI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 17 Juni tahun 2014 Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan. Terbitnya regulasi tersebut merupakan bentuk afirmasi pemangku kepentingan atas peran dan kontribusi yang dilakukan IAI sebagai organisasi profesi akuntan profesional yang bersifat nasional selama ini.



Susunan Pengurus

Periode 2022 – 2026



Dewan Penasihat

- 1 **Prof. Moermahadi Soerja Djanegara**
Ketua
- 2 **Ignasius Jonan**
- 3 **Kartika Wirjoatmodjo**
- 4 **Perry Warjiyo**
- 5 **Robert Pakpahan**
- 6 **Ruddy Koesnadi**
- 7 **Sapto Amal Damandari**
- 8 **Prof. Zaki Baridwan**



Dewan Pengawas IAI

- 1 **Prof. Mardiasmo**
Ketua
- 2 **Prof. Ainun Na'im**
- 3 **Akhsanul Khaq**
Ex Officio Badan Pemeriksa Keuangan RI
- 4 **Awan Nurmawan Nuh**
Ex Officio Kementerian Keuangan
- 5 **David E.S. Sidjabat**
- 6 **Jusuf Halim**
- 7 **Sophia Issabella Wattimena**
Ex Officio Otoritas Jasa Keuangan



Dewan Pengurus Nasional

Dewan Pengurus Nasional (DPN) merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial.

DPN yang dipilih oleh Kongres



DPN *Ex-Officio* Ketua Kompartemen



DPN *Ex-Officio* Perwakilan Ketua IAI Wilayah

Keanggotaan IAI



Pendaftaran dilakukan secara online melalui
iailounge.iaiglobal.or.id

Anggota berhak atas sejumlah benefit keanggotaan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas *e-paper* yang multiguna. Anggota dapat mengakses secara *online* PSAK, majalah Akuntan Indonesia, maupun sumber-sumber referensi lainnya. Setiap anggota akan mendapatkan email khusus **@akuntanindonesia.or.id** secara eksklusif.

Informasi fasilitas keanggotaan lainnya dapat dilihat di **www.iaiglobal.or.id**.

Member of
IFAC
 International Federation of Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
 Member of International Federation of Accountants

Daftar PPL IAI Melalui Aplikasi IAI Lounge

IAI Lounge

Download on the App Store | GET IT ON Google Play



IAI Corporate Partner

IAI Corporate Partner bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM entitas melalui pendidikan profesional berkelanjutan, program sertifikasi IAI dan kegiatan kemitraan strategis lainnya.

IAI AFFILIATED CAMPUS

BENEFITS OF THE IAI AFFILIATED CAMPUS PROGRAM

Membership Capacity Building Share Point IAI

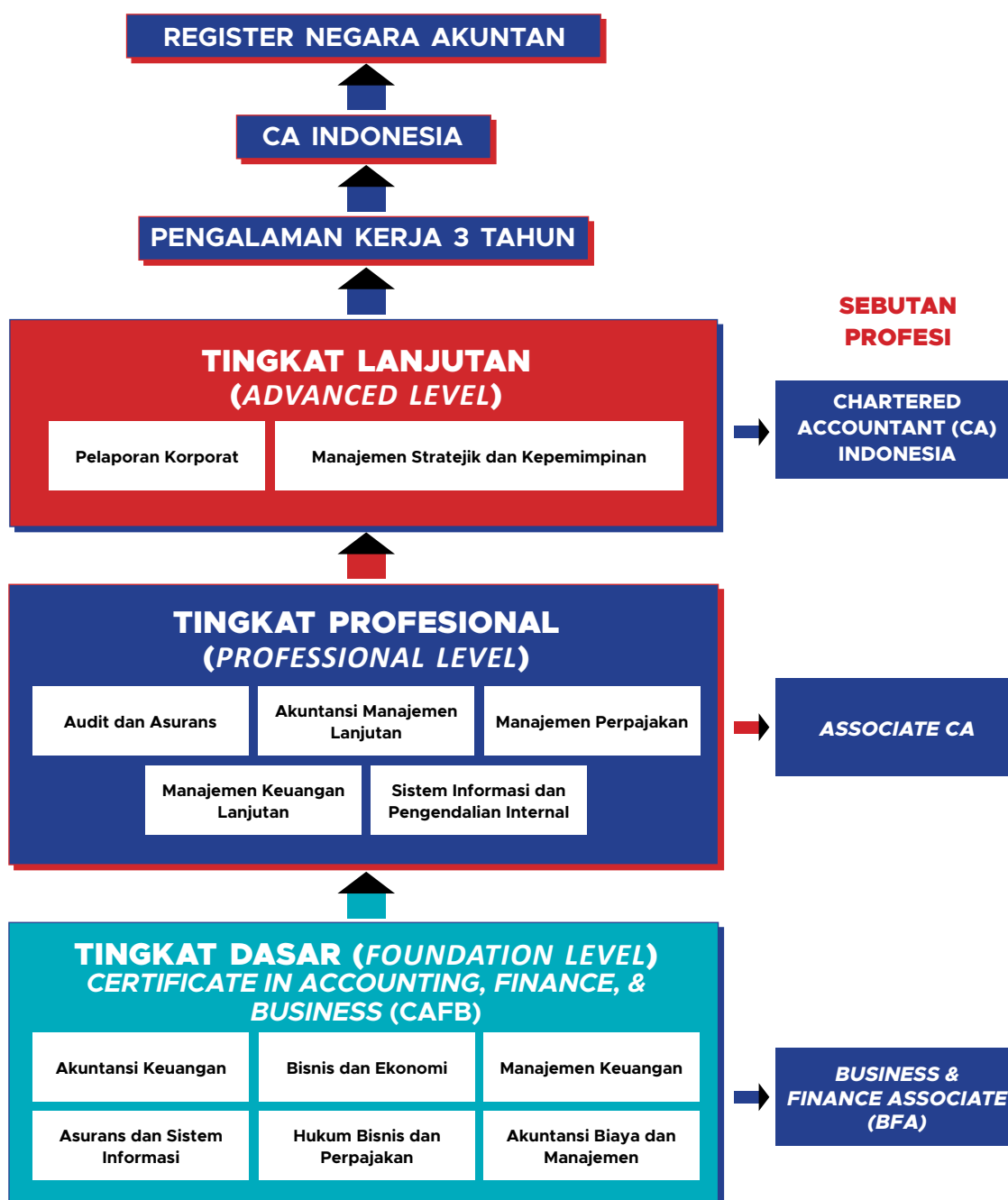
CBE Center IAI PR Services Beasiswa Ujian Sertifikasi IAI bagi Dosen dan Mahasiswa

INFORMASI LEBIH LANJUT: <http://iaiglobal.or.id/v03/affiliated-campus/>



IAI menjamin profesionalisme akuntan Indonesia melalui proses sertifikasi akuntan profesional *Chartered Accountant*.

PATHWAY INDONESIA





Sertifikasi Khusus

IAI menjamin profesionalisme individu yang memiliki kompetensi profesional khusus melalui proses sertifikasi khusus yang dilaksanakan iai.



Sharia Accounting Certification Examination (USAS)

Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) merupakan kontribusi IAI dalam meningkatkan perekonomian syariah nasional melalui peningkatan kompetensi SDM yang handal dalam penyusunan laporan keuangan transaksi syariah. USAS merupakan suatu strategi pengembangan keilmuan dan keahlian akuntansi syariah dalam rangka menghadapi dinamika dan tantangan industri syariah di Indonesia. USAS terdiri dari 3 level ujian, yaitu *elementary*, *intermediate*, dan *advance*.



Financial Accounting Standards Certification Examination (USPSAK)

IAI telah meluncurkan Ujian Sertifikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (USPSAK) sebagai salah satu solusi bagi pemenuhan SDM yang berkualitas dalam hal penyiapan laporan keuangan berbasis PSAK. Setiap peserta yang lulus USPSAK akan diberi sebutan “*Certified PSAK (CPSAK)*” oleh IAI dan akan diwajibkan senantiasa memutakhirkan kompetensinya melalui kegiatan PPL.



Government Accounting Certifications: US-CGAA & US-CGAE

Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan (USAAP) telah bertranspormasi menjadi Ujian Sertifikasi *Certified Government Accounting Associate* (US-CGAA) dan Ujian Sertifikasi *Certified Government Expert* (US-CGAE) yang dibagi atas pusat dan daerah. US-CGAE dibagi atas US-CGAE Level 1 dan US-CGAE Level 2. Ujian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi akuntan sektor pemerintahan dalam pelaporan keuangan baik di pemerintahan pusat atau daerah.



Certificate in Accounting, Finance & Business (CAFB)

Ujian Sertifikasi CAFB *Certificate in Accounting, Finance, and Business* (CAFB) dikembangkan IAI sebagai level fondasi bagi designasi Akuntan Profesional CA Indonesia. Sertifikasi ini sesuai standar dan *best practice global*. Melalui CAFB, IAI kini memiliki ujian tingkat dasar yang melengkapi ujian tingkat profesional yang telah diselenggarakan lebih dahulu, yaitu CA Indonesia.

Grha Akuntan IAI Pusat



IAI Knowledge Center Fatmawati

Ruko Duta Mas Fatmawati Blok A2 No. 03
ITC Fatmawati, Jakarta Selatan
Tlp 0821 1119 8329

IAI Knowledge Center Summarecon Bekasi

Ruko Sinpasa Commercial Blok A No. 37
Jl. Boulevard Selatan, Summarecon, Bekasi
HP: 0815 7458 4102

IAI Wilayah di 34 Propinsi



1 Aceh
Sekretariat IAI, Gedung KPMG
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Syiah Kuala, Kampus KOPELMA
Darussalam, Banda Aceh 23111
Tel: (0651) 755 2506 Fax: (0651) 755 2507

2 Sumatera Utara
PT Bank Sumatera Utara
Jl. Imam Bonjol No. 18 Madras Hulu,
Kec. Medan Polonia, Kota Medan,
Sumatera Utara
Tel: 0811-607-783

3 Riau
FEB Universitas Muhammadiyah Riau
Gedung AR Sutan Mansyur Lt. 3
Jl. Tuanku Tambusai, Kel. Delima
Kec. Tampan, Pekanbaru Riau,
Telp: 0813-7854-5500

4 Sumatera Barat
Sekretariat IAI, Kantor BPKP
Perwakilan Sumatera Barat Lt. 2
Jl. Aie Pacah KM 14, Padang 25177
Telp: 0812-6876-2884

5 Kepulauan Riau
Sekretariat IAI Wilayah Kepulauan Riau
Komplek Ruko Permana Niaga Blok C No. 20
Bukit Indah Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau
Tel: 0812-7021-900

6 Jambi
Komplek DPRD Jambi
Jl. Depati Unus No. 24 RT. 011
Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Jambi
Tel: 0812-7494-488

7 Sumatera Selatan
Grha Akuntan IAI Wilayah Sumatera Selatan,
Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1C, Ario
Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30128
Tel: (0711) 5711088, 0896 8249 1352

8 Bengkulu
Sekretariat IAI Wilayah Bengkulu
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Jl. Pembangunan No. 14 Padang Harapan
Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu 38225, Tel: 0813 7760 3577

9 Bangka Belitung
Inspektorat Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Komplek Perkantoran
Pemerintah Provinsi
Jl. Pulau Belitung No.2, Kepulauan Bangka
Belitung, Kel. Air Item,
Kec. Bukit Intan, Pangkalpinang
Tel: 0821-8284-0339

10 Lampung
Sekretariat IAI, Kampus STIKES Panca Bhakti
Jl. Zaenal Abidin Pagar Alam No. 14,
Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
Tel: (0721) 786 864, 0812 7901 900

11 Banten
Grha Akuntan IAI Wilayah Banten,
Jl. Bintaro Utama Raya 3A. Ruko Victorian
Blok AA. 06, Bintaro Jaya Pondok Aren,
Tangerang Selatan, Banten
Tel: (021) 27622890, 0877 7242 1904

12 DKI Jakarta
Grha Akuntan IAI Wilayah DKI Jakarta,
Perkantoran Gedung Gajah, Blok AR
Jl. Dr. Saharjo No. 111, Tebet, Jakarta Selatan.
Tel: (021) 835 4031, 835 3588
Fax: (021) 829 0324

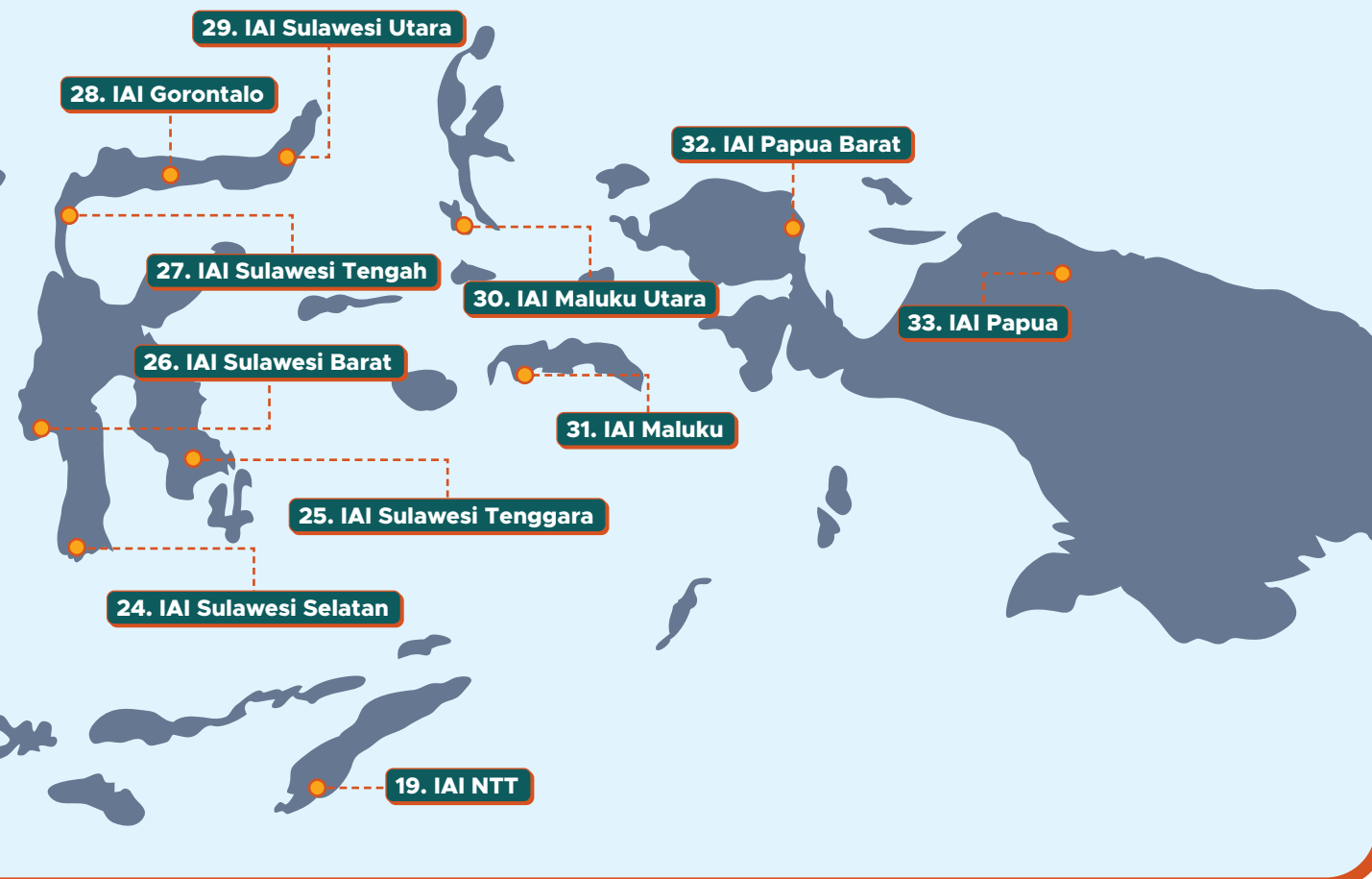
13 Jawa Barat
Grha Akuntan Jawa Barat, Komplek Surapati
Core Blok. L. Jl. Anggrek Boulevard No.1 Kel.
Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40192
Tel: (022) 2053 1351

14 Jawa Tengah
Grha Akuntan Jawa Tengah
Jl. Candi Prambanan RT 006, RW 11, Kelurahan
Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota
Semarang, Jawa Tengah
Tel: (0877 1874 6100)

15 D.I. Yogyakarta
Sekretariat IAI, Kampus STIE-YKPN Jl. Seturan,
Yogyakarta 55281.
Tel: (0274) 486 209 Fax: (0274) 486 209

16 Jawa Timur
Grha Akuntan Jatim
Jl. Krukah Utara No. 64 Surabaya 60245.
Tel. (031) 502 1125/504 8090

17 Bali
FEB Universitas Udayana
Jl. P.B. Sudirman Denpasar, Bali
Tel: 0851 7501 4088

**18 Nusa Tenggara Barat**

Sekretariat IAI Jurusan Akuntansi,
FEB Universitas Mataram
Jl. Majapahit 62 Mataram,
Nusa Tenggara Barat
Tel: 0878-8223-9670

19 Nusa Tenggara Timur

Sekretariat IAI, BPKP Perwakilan NTT
Jl. Palapa 21A, Kupang.
Tel: (0380) 829 142

20 Kalimantan Selatan

Gedung Baru FEB Universitas
Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123
Tel: 0822-5106-0069

21 Kalimantan Tengah

Sekretariat IAI
Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73112
Tel.: 082140741270

22 Kalimantan Barat

Sekretariat IAI, Gedung Magister
Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis,
Universitas Tanjung Pura
Jl. Imam Bonjol, Pontianak.
Tel: (0561) 571512, 0812 5710 002

23 Kalimantan Timur

Jl. Setia Raya Gg. 2 No. 25 RT. 052, Loa Ipuh
Tenggarong, Kutai Kertanegara

24 Sulawesi Selatan

Jl. Sultan Alauddin Komplek Plaza Alauddin
Blok BA No 2, Makassar 9022

25 Sulawesi Tenggara

Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara
Jl. Saosao No. 10 Kendari, Sulawesi Tenggara

26 Sulawesi Barat

Sekretariat IAI, BPKP Perwakilan
Provinsi Sulawesi Barat,
Jl. Haji Andi Endeng, Komp. Rimuku Indah
No. 2, Mamuju, Sulawesi Barat,
Tel: 0812 5710 002

27 Sulawesi Tengah

Sekretariat IAI Wilayah Sulawesi Tengah
Jurusan Akuntansi, FEB Universitas Tadulako
Jl. Soekarno Hatta KM. 9 Palu Timur
Sulawesi Tengah, 94118,
Tel: 0852 2019 8878

28 Gorontalo

Sekretariat IAI Wilayah Gorontalo
Gedung Ex Perpustakaan
FEB Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Tel: 0812-4443-9525

29 Sulawesi Utara

Sekretariat IAI Wilayah Sulawesi Utara
Kawasan Mega Mas Ruko Mega Smart 8,
No. 10, Manado, Sulawesi Utara
Tel: 0878 8119 1975

30 Maluku Utara

Sekretariat IAI Maluku Utara
FEB Universitas Khairun
Jl. Raya Pertamina, Gambesi, Maluku Utara
Tel: 0813 9444 9134

31 Maluku

Kampus Baru FEB Universitas Pattimura
Jl. Putuhena, Ambon, Maluku
Tel: 0812-1028-1966

32 Papua Barat

Sekretariat IAI, BPKP Perwakilan
Provinsi Papua Barat,
Jl. Angkasa Mulyono, Amban,
Manukwari 98314, Tel: (0986) 221 7087

33 Papua

Sekretariat IAI Wilayah Papua,
Gedung Magister Akuntansi,
FEB Universitas Cendrawasih
Jl. Raya Sentani Abepura Jayapura Papua
PO Box 442, Yabansai, Heram,
Jayapura City, Papua

34 Kalimantan Utara

Universitas Borneo Tarakan
Gedung Perpustakaan Lt. 2
Jl. Amal Lama No. 1, Kota Tarakan,
Kalimantan Utara 77111.
Tel: (0551) 381 0066, 0813 3875 5872



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

RENCANA STRATEGIS IKAT

PERIODE 2023-2028

IAI TUMBUH, KUAT

LANDASAN PENYUSUNAN



TUJUAN PENDIRIAN IAI (Akta Pendirian IAI)

1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan.
2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.



VISI IAI (AD ART IAI)

Menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.



MISI IAI (AD ART IAI)

1. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab, dan lingkungan hidup.
2. Mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat.
3. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan *good governance* melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.



Evaluasi Prakarsa 6.1 & Akumulasi IAI

Evaluasi realisasi program DPN periode 2018-2022 dan pencapaian IAI selama ini.



Lima Tren yang Memengaruhi Ekonomi & Profesi:

1. Friksi dalam ekonomi global.
2. Makin pentingnya *trust* di sektor publik dan privat.
3. Peningkatan fokus global pada *sustainability*.
4. Perubahan pada pekerjaan dan pendidikan masa depan.
5. Persebaran teknologi di berbagai bidang.

BERSATU MENCIPTAKAN PELUANG

NEXT 4 S

NEXT 1

Memperkuat **TRANSFORMASI PROFESI AKUNTANSI** melalui peningkatan **KUANTITAS** dan **KUALITAS** akuntan Indonesia yang memiliki **KOMPETENSI, KREDIBILITAS, INTEGRITAS** serta mematuhi regulasi, kode etik dan standar profesi.

Sasaran:

1. Peningkatan kualitas pendidikan akuntansi.
2. Pertumbuhan profesi akuntansi melalui penambahan jumlah anggota IAI.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas ujian sertifikasi akuntan profesional dan keahlian khusus IAI.
4. Pengembangan dan penguatan kompetensi dan keahlian anggota IAI.
5. Peningkatan pengakuan atas *value proposition* profesi akuntansi secara berkelanjutan.
6. Peningkatan pelayanan keanggotaan.
7. Peningkatan kepatuhan anggota IAI terhadap regulasi, kode etik dan standar profesi.

NEXT 2

Meningkatkan **KEPERCAYAAN PUBLIK** kepada profesi akuntansi sebagai **PEMIMPIN** dalam pengembangan ekosistem keuangan dan keberlanjutan.

Sasaran:

1. Peningkatan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi melalui pemutakhiran kode etik dan standar profesi.
2. Penguatan ekosistem pelaporan keuangan dan keberlanjutan melalui adopsi dan implementasi standar internasional.

PILAR

Keanggotaan & Sertifikasi

- Anggota
- Pendidikan Akuntansi
- Sertifikasi Akuntan Profesional dan Keahlian Khusus
- Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)
- Penegakan Disiplin

Kepercayaan Publik & Akuntabilitas

- Kode Etik Akuntan Indonesia
- Standar Profesi Jasa Akuntan
- Standar Akuntansi Keuangan
- Standar Pengungkapan Keberlanjutan

VALUES



Integritas

IAI menjalankan etika, transparansi dan akuntabilitas, memenuhi kepercayaan publik dan fokus kepada keberlanjutan jangka panjang organisasi.



TAN AKUNTAN INDONESIA

2022-2026

& BERKELANJUTAN

BERSAMA
G, MERAIH KESUKSESAN!

SUCCESS

CA IS A DIFFERENCE
MAKER

C Creating
Opportunities

A Aiming for
Success

NEXT 3

Memperkuat
PERLINDUNGAN HUKUM
dan **PRAKTIK KEPROFESIAN**
AKUNTAN di berbagai sektor
di era **KEBERLANJUTAN**.

Sasaran:

1. Penguatan perlindungan hukum dan pengakuan profesi akuntansi pada berbagai regulasi.
2. Pengembangan praktik keprofesian akuntan pendidik, akuntan sektor publik, akuntan perpajakan, akuntan syariah, akuntan berpraktik, dan akuntan sektor bisnis.

NEXT 4

Meningkatkan **TATA KELOLA ORGANISASI** IAI dan memperluas **KERJASAMA** dengan pemangku kepentingan profesi akuntansi.

Sasaran:

1. Penguatan tata kelola organisasi.
2. Keberlanjutan pendanaan untuk pengembangan organisasi.
3. Peningkatan dan perluasan kerja sama dengan para pemangku kepentingan profesi akuntansi.
4. Peningkatan komunikasi dengan konstituen IAI untuk meningkatkan rekognisi dan reputasi IAI.
5. Transformasi Teknologi Informasi (TI) dalam pengelolaan organisasi.

MITIGASI RISIKO



Risiko Strategik

- Kegagalan mempertahankan relevansi dan keaktifan dalam melayani dan melindungi kepentingan publik.
- Kegagalan mengidentifikasi, menyusun skala prioritas dan melakukan aksi untuk memenuhi espektasi anggota, publik dan pemangku kepentingan utama profesi.
- Hilangnya kepercayaan publik dan pemangku kepentingan utama dalam penyusunan standar profesi dan pelaksanaan praktik keprofesian.
- Fragmentasi dan inkonsistensi regulasi.
- Soliditas organisasi.



Risiko Operasional

- Pendanaan untuk pengembangan organisasi.
- Hilangnya hak kekayaan intelektual IAI.
- Sinkronisasi dan keaktifan pengurus dalam merealisasikan program kerja.
- Jumlah dan kualifikasi Manajemen Eksekutif IAI di pusat dan wilayah.
- Perkembangan teknologi informasi.

R IAI

Perlindungan Hukum & Praktik Keprofesian

Akuntan sesuai bidang profesi spesifik yang ditekuni:

- akuntan pendidik
- akuntan sektor publik,
- akuntan perpajakan,
- akuntan syariah,
- akuntan berpraktik,
- akuntan sektor bisnis, dan lain-lain

Keorganisasian & Kerjasama

- Tata Kelola
- Perangkat Kepengurusan
- Sumber Daya Organisasi
- Jejaring Organisasi

STRATEGI PENCAPAIAN

Fokus
Inovatif
Responsif
Sinergi
Terus berkelanjutan

Adaptif

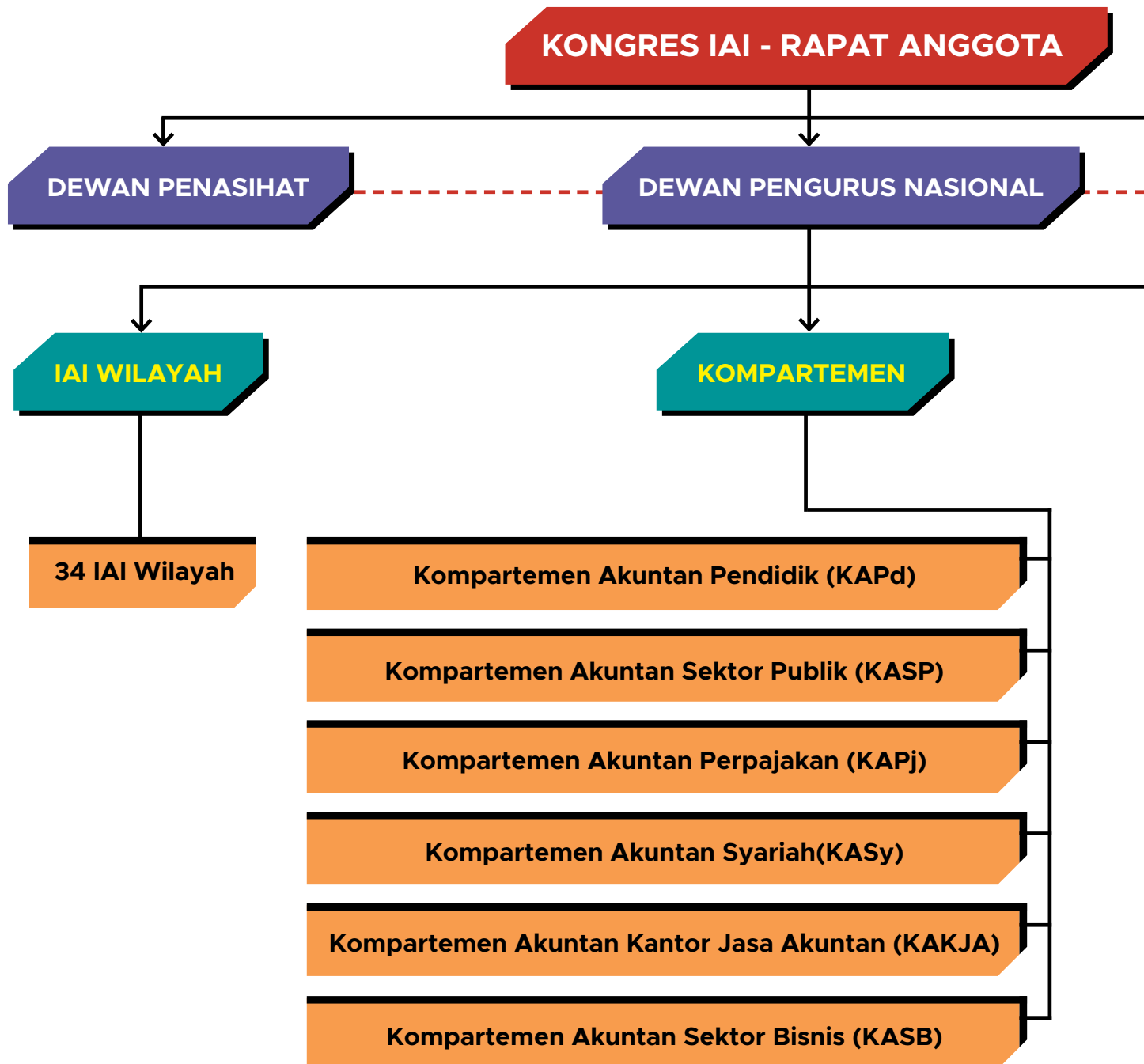
IAI merencanakan masa depan dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif, menyesuaikan diri dalam perubahan dan merespons dinamika lingkungan.



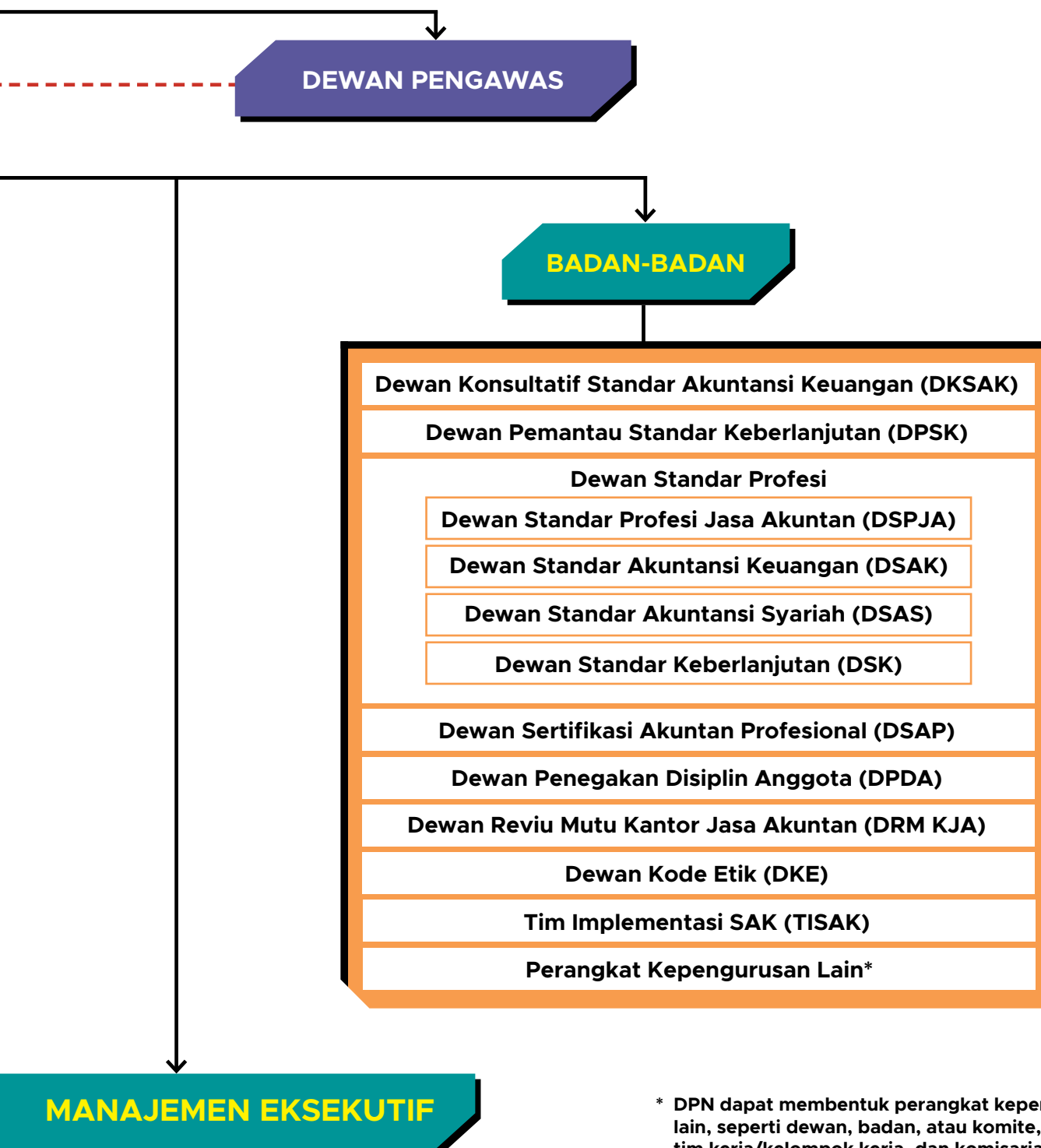
Inklusif

IAI menciptakan peluang bersama seluruh pihak dengan latar belakang yang beragam demi kemajuan profesi akuntansi dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Struktur Organisasi



ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN:



* DPN dapat membentuk perangkat kepengurusan lain, seperti dewan, badan, atau komite, forum, tim kerja/kelompok kerja, dan komisariat wilayah.

PENGEMBANGAN

SAK

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

— & —

SPK

STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN

2025

Pendahuluan

Sejak pendiriannya 67 tahun lalu, kini IAI telah mengalami perkembangan yang sangat pesat bila dibandingkan pada awal berdirinya. Hal ini merupakan perkembangan yang wajar karena profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha yang mengalami perkembangan yang pesat pula. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah meluasnya orientasi kegiatan profesi, tidak lagi semata-mata di bidang pendidikan akuntansi dan mutu pekerjaan akuntan, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan terlibat dalam perumusan kebijakan publik.

IAI adalah institusi yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Setiap institusi bisnis yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk menyusun laporan keuangannya berdasarkan SAK yang ditetapkan IAI. SAK adalah suatu kerangka pelaporan keuangan yang mencakup pilar-pilar SAK yang ditetapkan oleh IAI. SAK digunakan dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, SAK diperlukan untuk memudahkan penyusun laporan keuangan (*preparers*), pemeriksa laporan keuangan (*auditors*) serta pembaca laporan keuangan (*users*) untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

SAK dibuat agar seluruh pihak memiliki acuan yang jelas dan pemahaman yang sama. Penyeragaman ini menjadi penting mengingat tanpa adanya pengaturan oleh SAK maka setiap pihak dapat memiliki interpretasi berbeda atas suatu transaksi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan bagi seluruh entitas yang ada di Indonesia, terdapat 4 (empat) pilar standar akuntansi keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yaitu:

- ① SAK Internasional
- ② SAK Indonesia
- ③ SAK Indonesia untuk Entitas Privat (EP)
- ④ SAK Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)

SAK Indonesia untuk EP, yang merupakan adopsi dari IFRS for SMEs *Accounting Standards* dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia, disahkan oleh DSAK IAI pada 30 Juni 2021. SAK Indonesia untuk EP berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan diizinkan untuk diterapkan lebih awal.

SAK Internasional adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang merupakan adopsi penuh dari IFRS *Accounting Standards* yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). SAK Internasional disahkan oleh DSAK IAI pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Penggunaan SAK Internasional ditetapkan melalui peraturan regulator pasar modal.



IAI bertanggungjawab untuk menyusun dan mensosialisasikan SAK yang telah ditetapkannya secara luas kepada masyarakat serta memfasilitasi anggota maupun nonanggota untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan secara berkelanjutan kompetensi profesionalnya di bidang akuntansi.

Memenuhi Kebutuhan Perusahaan

Sebagai satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, Indonesia harus tunduk kepada keputusan bersama G20 dalam meningkatkan kerja sama perekonomian dunia dengan menciptakan suatu “bahasa” akuntansi yang sama, yaitu terciptanya suatu Standar Akuntansi Keuangan yang berkualitas tinggi dan berlaku global. Tujuan ini kemudian diterjemahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI dengan merevisi Standar Akuntansi Keuangan agar secara substansial sesuai dengan *IFRS Accounting Standards*.

DSAK IAI bukan hanya mengadopsi *IFRS Accounting Standards* menjadi suatu standar yang baru, namun juga meninjau keterkaitan standar tersebut dengan praktik relevan dan PSAK yang sudah ada, mencabut PSAK yang tidak dibutuhkan lagi agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan akuntansi, juga melakukan riset terbatas mengenai aplikasi standar tersebut di Indonesia.

Mendukung Program Pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia selain terus berusaha mengendalikan inflasi melalui kegiatan seperti operasi pasar dan pasar murah juga ingin memacu laju kegiatan ekonomi rakyat melalui berbagai program yang mendukung usaha mikro, kecil, menengah. Hal ini dicapai baik melalui program bantuan sosial, program kemitraan dan program lainnya. Agar program bantuan tersebut dapat segera direalisasikan dan tepat sasaran maka diperlukan sistem akuntabilitas dalam bentuk pelaporan keuangan sehingga usaha mikro, kecil dan menengah dapat memiliki akses pendanaan yang lebih baik kepada investor, kreditur dan hibah pemerintah.

Untuk mendukung program pemerintah tersebut, IAI melihat bahwa terdapat kebutuhan standar akuntansi untuk melayani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Total UMKM di Indonesia menurut data statistik Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2013 ada sebanyak 57.895.721 entitas. Beberapa riset menemukan bahwa masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik. Salah satu alasannya adalah dikarenakan standar akuntansi yang berbasiskan *IFRS Accounting Standards* masih belum sesuai dengan karakteristik UMKM di Indonesia sehingga belum dapat digunakan dan diterapkan oleh UMKM tersebut. DSAK IAI bukan hanya berfokus pada pengembangan SAK berbasiskan *IFRS Accounting Standards*, namun juga SAK yang dapat mengakomodir kebutuhan UMKM di Indonesia, yakni dengan mengembangkan SAK Entitas Privat (SAK EP), dan SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).



IAI Menyusun SAK di Indonesia

Pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan GAAS (*Generally Accepted Auditing Standards*). Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974, sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis, IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)" yang mengacu pada US GAAP.

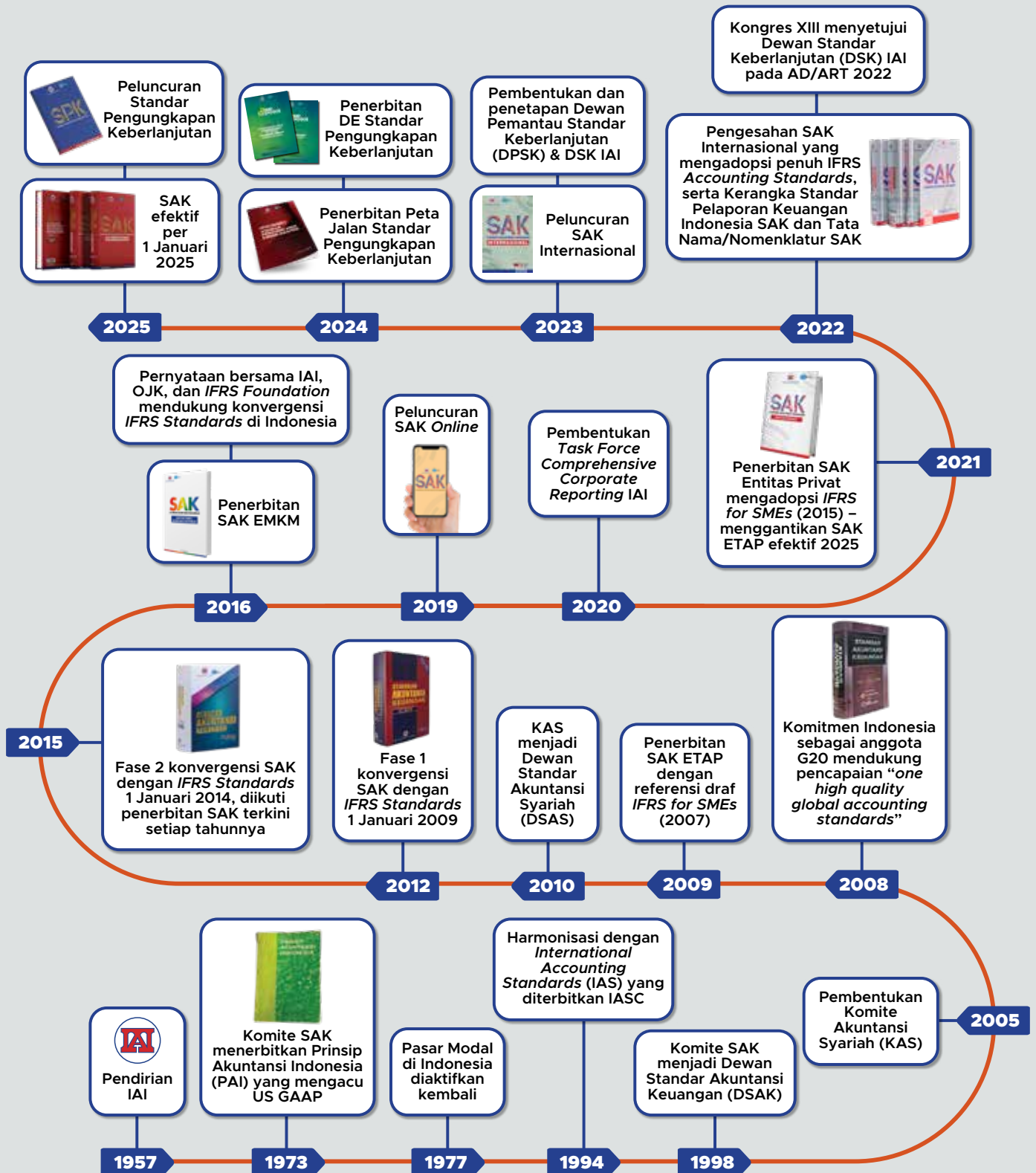
Sebagai tindaklanjut dari salah satu butir kesepakatan Anggota G-20 pada tahun 2009, IAI telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke IFRS Accounting Standards secara bertahap dengan dukungan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) Bank Indonesia, Kementerian Negara BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, dan regulator lainnya. Dampak program konvergensi ini menyebabkan SAK menjadi bersifat *principle-based*.

Konvergensi tahap pertama dilakukan pada tahun 2012 di mana pada umumnya SAK per 1 Juni 2012 telah mengacu pada IFRS Standards per 1 Januari 2009. Selanjutnya, konvergensi fase kedua melahirkan SAK efektif per 1 Januari 2015 yang secara umum mengacu ke IFRS Accounting Standards efektif per 1 Januari 2014. Melalui proses ini, perbedaan antara SAK dengan IFRS Accounting Standards menjadi tidak signifikan, dari 3 (tiga) tahun menjadi 1 (satu) tahun. Suatu bukti nyata atas usaha DSAK IAI dalam menyelaraskan pengaturan SAK dengan IFRS Accounting Standards.

Saat ini, DSAK IAI berhasil menghilangkan gap 1 tahun tersebut, yaitu SAK efektif per 1 Januari 2025 secara substansial konvergen dengan IFRS Accounting Standards efektif per 1 Januari 2025. Penghilangan gap ini merupakan komitmen DSAK IAI untuk mendukung penerapan standar akuntansi berbasis internasional di Indonesia.

IAI selama ini telah mendapatkan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka pengembangan SAK dan profesi akuntan dalam mendukung pelaksanaan sektor jasa keuangan melalui Nota Kesepahaman yang pertama kali ditandatangani pada 8 Juni 2015 dan diperpanjang pada 21 Oktober 2019.

PENYUSUNAN SAK DI INDONESIA



Badan-Badan IAI



Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut DKSAK IAI merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAI, untuk memberikan pandangan mengenai arah dan skala prioritas kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

DKSAK IAI berwenang memberikan pandangan-pandangan mengenai arah dan skala prioritas pengembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang akan diberlakukan, serta memberi pendapat dan pertimbangan atas dampak penerapan SAK tersebut.

DKSAK IAI juga dapat memberi pertimbangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota DSAK IAI untuk menjaga kualitas penyusunan SAK di Indonesia. Selain itu, DKSAK IAI melakukan penggalangan dana dalam rangka penyusunan SAK.



Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut DSAK IAI merupakan badan yang bertugas melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK, meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia pada penyusunan IFRS *Accounting Standards*, serta menjawab pertanyaan regulator, asosiasi dan lembaga luar negeri terkait SAK dalam hal dipandang perlu berdasarkan pertimbangan DSAK IAI.



Dewan Standar Akuntansi Syariah

Dewan Standar Akuntansi Syariah yang selanjutnya disebut DSAS IAI merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAI, yang bertugas melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), serta menjawab pertanyaan regulator, asosiasi dan lembaga luar negeri terkait PSAK Syariah dalam hal dipandang perlu berdasarkan pertimbangan DSAS IAI.



Tim Implementasi SAK

Tim Implementasi Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut TISAK IAI merupakan badan yang bertugas untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai SAK melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya.

TISAK IAI juga dapat memberikan masukan kepada DPN, DKSAK dan DSAK dalam rangka menyikapi isu, konsultasi, dan permasalahan implementasi SAK. Selain itu, TISAK IAI juga memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan pengkajian untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam rangka implementasi SAK.



Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan

Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan yang selanjutnya disebut DPSK IAI merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAI, untuk memberikan arahan strategis, kebijakan dan rekomendasi kepada Dewan Standar Keberlanjutan yang selanjutnya disebut DSK IAI mengenai penyusunan standar pengungkapan keberlanjutan di Indonesia.

DPSK IAI juga berwenang melakukan seleksi anggota DSK IAI pada periode berikutnya dan mengusulkan hasilnya kepada DPN IAI, menyetujui usulan rencana strategis DSK untuk ditetapkan DPN IAI, memonitor dan mengawasi rencana strategis DSK IAI, serta memberi pertimbangan dan menyetujui program kerja tahunan yang disusun oleh DSK IAI. Dalam hal ini, DPSK IAI memberikan pertimbangan terbatas pada pandangan umum mengenai prioritas program kerja DSK IAI, tidak mencakup substansi standar pengungkapan keberlanjutan. Selain itu, DPSK IAI diberi mandat untuk mengevaluasi kinerja DSK IAI, dan membantu proses koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang dibutuhkan oleh DSK IAI dalam pengembangan standar keberlanjutan secara keseluruhan.



Dewan Standar Keberlanjutan

DSK IAI merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAI, untuk mempersiapkan, merumuskan, menetapkan standar pengungkapan keberlanjutan sesuai dengan due process procedure, mengusulkan rencana strategis dan program kerja tahunan DSK IAI kepada DPSK IAI, melakukan konsultasi publik dalam rangka penyusunan program kerja tahunan, melakukan kajian dan riset terkait penyusunan standar pengungkapan keberlanjutan, dan menjawab pertanyaan dari publik terkait standar pengungkapan berkelanjutan dalam hal dipandang perlu berdasarkan pertimbangan DSK IAI.



Tim Kerja Keberlanjutan

Tim Kerja Keberlanjutan yang selanjutnya disebut TKK IAI merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAI, untuk memberikan dukungan teknis berupa dan/atau tidak terbatas pada penelitian, analisis dan penyusunan usulan tanggapan/rekomendasi atas perumusan dan implementasi standar pengungkapan keberlanjutan. Selain itu, TKK IAI juga memberikan masukan kepada DSK IAI dalam rangka menyikapi isu, konsultasi, dan permasalahan terkait standar pengungkapan keberlanjutan, melaksanakan sosialisasi terkait standar pengungkapan keberlanjutan. Serta, TKK IAI bertugas untuk melaksanakan kegiatan lainnya sesuai penugasan DSK IAI untuk menindaklanjuti program IAI terkait penerapan standar pengungkapan keberlanjutan.



Susunan Pengurus IAI

DEWAN KONSULTATIF STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (DKSAK) IAI

1. Prof. Ilya Avianti (Ketua)
2. Amir Abadi Jusuf
3. Iman Rachman (*ex-officio* SRO)
4. Istini T. Siddharta
5. Johanes B.P. Simandjuntak (*ex-officio* BI)
6. Ogi Prastomiyono (*ex-officio* OJK)

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (DSAK) IAI

1. Severinus Indra Wijaya (Ketua)
2. Alexander Adrianto Tjahyadi
3. Aria Farah Mita
4. Bahrudin (*ex-officio* OJK)
5. Dede Rusli
6. Devi Sulistyo Kalanjati
7. Dini Rosdini
8. Elisabeth Imelda
9. Endro Wahyono
10. Irwan Lawardy Lau
11. Muhammad Maulana (*ex-officio* OJK)
12. Nurhasan (*ex-officio* OJK)
13. Zuni Barokah

TIM IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (TISAK) IAI

1. Budi Susanto (Ketua)
2. Danil S. Handaja (Wakil Ketua)
3. Ahmad Zaki
4. Alexander Tansil
5. Andri Kurniawan Effendi
6. Didik Purwanto
7. Pebriansyah
8. Raymond Kurniawan
9. Renaldi Giovani Ndoen
10. Stefanus Ariyanto
11. Surya Mardi Dominic

DEWAN PEMANTAU STANDAR KEBERLANJUTAN

1. Rosita Uli Sinaga (*ex-officio* DPN IAI), (Ketua)
2. Prof. Lindawati Gani (*ex-officio* DPN IAI)
3. Jumadi (*ex-officio* DPN IAI)
4. Lucas Kurniawan
5. Bobby Wahyu Hernawan (*ex-officio* Kementerian Keuangan RI)
6. Laksmi Dhewanthi (*ex-officio* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)
7. Indah Iramadhini (*ex-officio* OJK)
8. Saptadi (*ex-officio* Bank Indonesia)
9. Nawal Nely

DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH (DSAS) IAI

1. Yasir (Ketua)
2. Achmad Zaky
3. Alis Subiyantoro (*ex-officio* OJK)
4. Eko Wisnu Warsitosunu
5. Fachmy Achmad
6. Gunawan Setyo Utomo (*ex-officio* OJK)
7. Herry Setiadie
8. Juni Supriyanto
9. Prof. Jaih Mubarak (*ex-officio* DSN MUI)
10. Muhammad Bagus Teguh Prawira (*ex-officio* DSN MUI)
11. Muhammad Gunawan Yasni
12. M. Dawud Arif Khan (*ex-officio* DSN MUI)
13. Suhendar
14. Abdul Rahmat (*ex-officio* OJK)
15. Putri Almainda Kamila (*ex-officio* BI)

DEWAN STANDAR KEBERLANJUTAN

1. Istini T. Siddharta (Ketua)
2. Nanik Nuryani (*ex-officio* Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan RI)
3. Jarot Suroyo (*ex-officio* OJK)
4. Arnita Rishanty (*ex-officio* Bank Indonesia)
5. Wahyu Marjaka (*ex-officio* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)
6. Arie Pratama
7. Elvia R. Shauki
8. Luthfyana Kartika Larasati
9. Palti Ferdrico T.H. Siahaan
10. Prabandari I. Moerti
11. Rizkia Sari Yudawinata
12. Susanti
13. Yuliana Sudjonno

TIM KERJA KEBERLANJUTAN (TKK) IAI

1. Luluk Widyastuti (Ketua)
2. Angga Puja Prayoga
3. Prof. Iman Harymawan
4. Desy
5. Ika Merdekawati
6. Airlangga Djati
7. Yohannes Handoko Aryanto



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS

BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Jangan ketinggalan
perkembangan
SAK terbaru!

Manfaatkan
status **Anggota Aktif** Anda
dengan **harga khusus!**

Buku "Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Efektif per 1 Januari 2025" ini merupakan kompilasi terkini produk standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh DSAK IAI.

Buku ini mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif per 1 Januari 2025 serta Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) yang masuk dalam SAK Indonesia.

Buku ini juga mencakup standar yang telah disahkan dan akan berlaku efektif setelah 1 Januari 2025, yaitu:

- Amandemen PSAK 109 dan PSAK 107 tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; dan
- Penyesuaian Tahunan 2024 untuk PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207.

HARGA*

1.650.000

(Anggota IAI)

1.900.000

(Non Anggota IAI)

Telah terbit

SAK

**STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
INDONESIA**

EFEKTIF PER
1 JANUARI 2025



* Harga buku belum termasuk ongkos kirim.



<https://linktree/IAIakuntan>

Pemesanan secara online melalui email:

gerai@iaiglobal.or.id | fazri.reza@iaiglobal.or.id



WA Official IAI

WA Official IAI
08 111 054 141

Pengembangan SAK IAI

- 1 **Sejarah singkat pengembangan SAK di Indonesia** – Pengembangan SAK di Indonesia dilakukan IAI selaku organisasi profesi akuntan Indonesia secara berkelanjutan sebagai berikut:
 - a. **1973** – IAI melalui Komite Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menerbitkan buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang menggunakan acuan US GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*). Pada tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
 - b. **1994** – IAI melakukan revisi menyeluruh atas PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku SAK yang mulai berharmonisasi dengan *International Accounting Standards* (IAS) yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC) yang merupakan cikal bakal *International Accounting Standards Board* (IASB).
 - c. **1998** – Pada Kongres VIII IAI, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang diberikan kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan SAK.
 - d. **2005** – IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) untuk menopang kegiatan DSAK dalam pengembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan transaksi Syariah.
 - e. **2008** – Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 menyampaikan komitmen untuk mendukung penerapan standar akuntansi global (yaitu *IFRS Accounting Standards*). Hal ini ditegaskan IAI dengan penyampaian komitmen untuk melanjutkan proses konvergensi SAK dengan *IFRS Accounting Standards*.
 - f. **2009** – DSAK menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) sebagai acuan penyusunan laporan keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
SAK ETAP menggunakan referensi draf *IFRS for SMEs Accounting Standard* yang diterbitkan IASB pada tahun 2007.
 - g. **2010** – KAS bertransformasi menjadi Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) yang bertugas melakukan pengembangan PSAK transaksi Syariah. Pada tahun 2013, kewenangan atas PSAK Syariah yang sebelumnya disusun oleh DSAK dialihkan kepada DSAS.
 - h. **2012** – Fase pertama konvergensi *IFRS Accounting Standards* telah dilaksanakan, dengan *gap* penerapan 3 tahun antara SAK dan *IFRS Accounting Standards*.
 - i. **2015** – Fase kedua konvergensi *IFRS Accounting Standards* telah dilaksanakan, dengan *gap* penerapan 1 tahun antara SAK dan *IFRS Accounting Standards*. DSAK terus menjaga keseimbangan antara konsistensi penerapan ini dengan kesiapan pemangku kepentingan di Indonesia.

- j. 2016** – DSAK menerbitkan SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Dalam hal konvergensi IFRS *Accounting Standards*, IAI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IFRS *Foundation* menandatangani Pernyataan Bersama, sebagai bentuk dukungan OJK serta pengakuan IFRS *Foundation* atas pencapaian signifikan konvergensi IFRS *Accounting Standards* di Indonesia.
- k. 2021** – DSAK mengesahkan SAK Entitas Privat (mengadopsi IFRS for SMEs *Accounting Standard* versi 2015) yang rencananya akan menggantikan SAK ETAP. SAK Entitas Privat akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025
- l. 2022** – Pada 12 Desember 2022 DSAK IAI telah mengesahkan SAK Internasional sebagai pilar baru standar pelaporan keuangan di Indonesia. SAK Internasional ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. DSAK IAI juga mengesahkan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI) yang mengatur antara lain ragam pilar SAK, kriteria pengguna masing-masing pilar SAK, dan perpindahan antar pilar SAK. DSAK IAI juga mengesahkan perubahan penomoran SAK Indonesia yang membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada IFRS *Accounting Standards* dan yang tidak merujuk pada IFRS *Accounting Standards* sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan yang bersifat lokal di Indonesia. Perubahan ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

2 Partisipasi dan kontribusi global – Profesi akuntan Indonesia melalui, DSAK dan DSAS juga aktif dalam diskusi dan pengembangan standar akuntansi global, menyuarakan kepentingan serta berbagai isu penerapan di Indonesia:

- a. IFRS** – DSAK aktif terlibat dalam *due process procedure* pengembangan IFRS, melalui pembahasan di berbagai forum seperti *Emerging Economies Group* (EEG), *World Standard-Setters* (WSS), *The International Financial Accounting Standard-Setters* (IFASS) dan *Asian-Oceanian Standard-Setters Group* (AOSSG), maupun memberikan tanggapan atas *exposure draft*, *discussion paper*, maupun *request for information* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB).
- b. Isu akuntansi Indonesia** – DSAK juga aktif membawa berbagai isu akuntansi Indonesia ke ranah global, seperti akuntansi menara telekomunikasi dan perlakuan akuntansi atas tanah (sebagai *co-lead working group* AOSSG *Leases*), dengan catatan keberhasilan diakomodirnya penjelasan atas akuntansi hak atas tanah dalam *Basis for Conclusions* IFRS 16 *Leases* (paragraf BC138–BC140). Selain itu, sebagai anggota *working group* AOSSG untuk IAS 41 *Agriculture*, DSAK melibatkan pemangku kepentingan seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam pembahasan isu akuntansi agrikultur di Indonesia.
- c. Sharia Standards** – DSAS juga aktif terlibat dalam pengembangan standar akuntansi global baik IFRS maupun Standar Akuntansi Syariah yang disusun *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) melalui pembahasan di dalam *AOSSG meeting*, *IFRS Islamic Finance Consultative Group*, *round table* AAOIFI *meeting* maupun forum diskusi lainnya.

- 3 **Keterlibatan pemangku kepentingan** – Pengembangan SAK yang dilakukan oleh IAI dilaksanakan melalui kepengurusan dan struktur keorganisasian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ekosistem pelaporan keuangan di Indonesia. Kongres IAI sebagai pemegang kedaulatan tertinggi secara independen memilih anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN), yang didukung organ-organ seperti Dewan Penasihat, Majelis Kehormatan, serta berbagai Badan dan Kompartemen seperti DSAK, DSAS, dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK) yang anggotanya mewakili berbagai latar belakang profesi akuntan.
- 4 **Pendanaan** – Pengembangan SAK oleh IAI secara garis besar didanai oleh dua sumber dana utama, yaitu:
- a. **Kontribusi otoritas** – Kontribusi sukarela yang diberikan oleh otoritas pemangku kepentingan utama sektor keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, IAI didukung kontribusi Bank Indonesia dan juga lembaga *Self-Regulatory Organizations* (SRO) yang terdiri atas Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Penggunaan dana yang berasal dari kontribusi ini bersifat terikat temporer atas pengembangan SAK, dan dilaporkan secara khusus melalui mekanisme laporan pertanggungjawaban.
 - b. **Aktivitas operasional** – Pendapatan yang diterima dari aktivitas operasional yang terkait dengan SAK seperti dari langganan akses SAK *Online*, penjualan buku SAK, serta pelatihan yang terkait dengan SAK.

KONVERGENSI & ADOPSI PENUH IFRS ACCOUNTING STANDARDS

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Melalui Standar Akuntansi Berkualitas Internasional

Konvergensi IFRS Accounting Standards

Konvergensi *International Financial Reporting Standards (IFRS) Accounting Standards* merupakan pencapaian penting IAI sebagai organisasi yang memberi *value* bagi *stakeholders*. Proses konvergensi tersebut dimulai setelah komitmen dukungan atas IFRS *Accounting Standards* sebagai standar akuntansi keuangan global dicanangkan pada pertemuan G20 pada 8 Desember 2008.

KONVERGENSI FASE 1

Konvergensi fase 1 dilakukan pada tahun 2012 dengan diluncurkannya SAK per 1 Juni 2012 yang telah mengacu pada IFRS *Accounting Standards* per 1 Januari 2009.

KONVERGENSI FASE 2

Proses ini terus dilakukan secara aktif oleh DSAK IAI sebagai badan penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Seiring perkembangan, DPN IAI mendorong dan memberikan dukungan penuh bagi DSAK IAI untuk melakukan konvergensi IFRS *Accounting Standards* fase 2, yang ditandai dengan tahun efektif SAK yang berbeda 1 tahun dengan tahun efektif IFRS *Accounting Standards*. DSAK IAI melaksanakan amanah *gap* 1 tahun tersebut sehingga SAK efektif per 1 Januari 2015 secara garis besar telah konvergen dengan hhyang berlaku efektif per 1 Januari 2014.

Pencapaian Penting Konvergensi IFRS



1

MENGEMBANGKAN STANDAR AKUNTANSI BERKUALITAS INTERNASIONAL

SAK efektif per 1 Januari 2025 secara umum konvergen dengan IFRS *Accounting Standards* efektif per 1 Januari 2025



2

MEMPERKUAT DUKUNGAN REGULATOR

“OJK, IAI & IFRS Foundation Joint Statement” menjadi bukti sejarah atas dukungan penuh regulator untuk proses konvergensi IFRS *Accounting Standards* yang telah dilakukan IAI selama ini.



3

MENDORONG KETERLIBATAN STAKEHOLDERS

Membentuk IFRS Working Group dan Focus Group Discussion yang telah memberikan sesi pemahaman IFRS *Accounting Standards* kepada lebih dari 500 peserta.



4

MENINGKATKAN PENGARUH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI GLOBAL

IAI mengirimkan 71 tanggapan tertulis atas dokumen *due process procedure* yang diantaranya adalah *Exposure Draft IFRS Accounting Standards*, *IFRIC Tentative Agenda Decision*, *Discussion Paper*, *Request for Information*, *Post-Implementation Review* dan aktif berkontribusi pada 59 rapat pembahasan di forum internasional.

Adopsi Penuh IFRS Accounting Standards

Pada 12 Desember 2022 DSAK IAI telah mengesahkan SAK Internasional sebagai pilar baru standar pelaporan keuangan di Indonesia. SAK Internasional merupakan adopsi penuh dari IFRS Accounting Standards yang diterbitkan oleh IASB. Entitas yang dapat menggunakan SAK Internasional ditentukan oleh regulator pasar modal. SAK Internasional ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

Selain itu DSAK IAI juga mengesahkan perubahan penomoran SAK Indonesia (pilar SAK yang kedua) yang membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada IFRS Accounting Standards dan yang tidak merujuk pada IFRS Accounting Standards sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan yang bersifat lokal di Indonesia. Perubahan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

PENGEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI BERKUALITAS INTERNASIONAL

Periode 2015 - 2025



Saat ini, DSAK IAI berhasil menghilangkan gap 1 tahun tersebut, yaitu SAK efektif per 1 Januari 2025 secara substansial konvergen dengan IFRS Accounting Standards efektif per 1 Januari 2025. Penghilangan gap ini merupakan komitmen DSAK IAI untuk mendukung penerapan standar akuntansi berbasis internasional di Indonesia.

Sepanjang tahun 2015 – Juni 2025, DSAK IAI telah berhasil mengeluarkan 64 produk standar yang sebagian besar merupakan hasil konvergensi IFRS Accounting Standards dan 1 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Adopsi Penuh IFRS Accounting Standards Berlaku Efektif Per 1 Januari 2024

PRODUK IFRS	<i>IFRS Accounting Standards</i>
ADOPSI PENUH	Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Adopsi 2 Standar Besar Berlaku Efektif Per 1 Januari 2025 dan Setelahnnya

PRODUK IFRS	IFRS 17: <i>Insurance Contracts</i>	IFRS for SMEs <i>Accounting Standard</i> (versi 2015)	IFRS 18: <i>Presentation and Disclosure in Financial Statements</i>
HASIL KONVERGENSI IFRS	PSAK 117: <i>Kontrak Asuransi</i>	SAK Entitas Privat	PSAK 118: <i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i>

Selama tahun 2023-2025, DSAK IAI mengadakan FGD terkait PIR IFRS 9, PIR IFRS 15, PIR IFRS 16, PIR SAK EMKM, PIR PSAK 338, PIR ISAK 335, FGD atas Exposure Draft IASB terkait Business Combinations – Disclosures Goodwill and Impairment (ED BCDGI), dan FGD Jaminan Sosial. FGD atas PIR dilakukan untuk meminta pandangan publik atas penerapan suatu Standar apakah telah sesuai dengan tujuan penerbitannya. Sedangkan tujuan dari FGD atas ED BCDGI untuk memperoleh tanggapan dari publik yang akan menjadi masukan DSAK IAI ketika memberikan tanggapan kepada IASB. Selanjutnya tujuan dari FGD jaminan sosial adalah untuk menggali konsep dan praktik penyelenggaraan asuransi sosial di Indonesia.

DSAK IAI juga didukung oleh Tim Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (TISAK) yang bertugas untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai Standar Akuntansi Keuangan (khususnya SAK berbasis *IFRS Accounting Standards*). Selama periode 2015 - Juni 2025, TISAK telah aktif dalam pembahasan akuntansi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti regulator, asosiasi, dan juga menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan SAK. Beberapa topik pembahasan yang telah dilakukan TISAK selama periode 2015 - Juni 2025 antara lain sosialisasi PSAK berbasis IFRS, akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), revaluasi aset tetap, transaksi repo, akuntansi nonlaba, akuntansi yayasan, laporan keuangan terintegrasi, SAK Entitas Privat dan topik akuntansi lainnya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung proses konvergensi *IFRS Accounting Standards*, IAI telah membuat nota kesepahaman dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI). Pelaksanaan atas nota kesepahaman tersebut antara lain telah dilaksanakannya diskusi pembahasan implementasi PSAK 219: *Imbalan Kerja* yang melibatkan TISAK, serta keterlibatan PAI dalam WG IFRS 17: *Insurance Contracts*.

MENINGKATKAN PENGARUH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI GLOBAL



67

SURAT TANGGAPAN TELAH
DIKIRIMKAN KE IASB DAN/ IFRIC.

57

PEMBAHASAN
IFRS DI FORUM
INTERNASIONAL
TELAH DIKUTI.



Peran Aktif DSAK IAI dalam Pengembangan IFRS Accounting Standard

Untuk menjaga keberhasilan proses konvergensi IFRS *Accounting Standards*, DSAK IAI senantiasa mengikuti perkembangan IFRS dan menyesuaikan program kerjanya sesuai dengan rencana kerja IASB.

DSAK IAI berkontribusi memberikan tanggapan tertulis (*comment letter*) atas draf IFRS *Accounting Standards*, *IFRIC Tentative Agenda Decision*, *Discussion Paper*, *Request for Information* baik yang dikeluarkan IASB dan/ IFRIC. DSAK IAI senantiasa melakukan update atas draf standar yang diterbitkan IASB. Selama tahun 2022 - Juni 2025, DSAK IAI telah mengirimkan 71 tanggapan tertulis ke IASB dan/ IFRIC. Hal tersebut menjadi bukti keterlibatan aktif IAI mewakili Indonesia berkontribusi dalam pengembangan IFRS *Accounting Standards*.

Pengaruh DSAK IAI mewakili Indonesia dalam proses pengembangan IFRS *Accounting Standards* telah ditandai dengan penerbitan IFRS 16: *Leases* yang telah memuat isu akuntansi hak atas tanah di Indonesia yang telah disampaikan oleh DSAK IAI pada berbagai forum dan diskusi internasional.

Peran Aktif DSAK IAI di Forum Internasional

Untuk mensukseskan program konvergensi IFRS *Accounting Standards* di Indonesia, DSAK sebagai *standard setter* senantiasa aktif berkontribusi dalam pembahasan isu-isu pengembangan dan implementasi IFRS *Accounting Standards* di berbagai forum internasional. Peran aktif tersebut diharapkan dapat memperkuat peran dan posisi Indonesia dalam proses pengembangan standar akuntansi dunia. Hingga saat ini, DSAK IAI aktif tergabung dalam WG pada forum internasional tersebut seperti WG *Business Combinations*, *Extractive Activities*, *Financial Instruments with Characteristic Equity*, dan lain-lain.

Selama tahun 2015 - Juni 2025, DSAK IAI telah mengikuti rapat pembahasan IFRS *Accounting Standards* di berbagai forum internasional.

Asia-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG)

Forum internasional badan penyusun standar akuntansi berbasis IFRS *Accounting Standards* di regional Asia-Oseania. Forum ini bertujuan untuk membahas isu dan berbagi pengalaman dalam adopsi IFRS *Accounting Standards* dan berkontribusi dalam pengembangan IFRS *Accounting Standards*.

15 pertemuan AOSSG telah diikuti.

Emerging Economies Group (EEG)

Forum yang dibentuk *IFRS Foundation* yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pengaruh negara-negara G20 dalam pengembangan IFRS *Accounting Standards*.

19 pertemuan EEG telah diikuti.

The International Financial Accounting Standard-Setters (IFASS)

Forum internasional badan penyusun standar akuntansi seluruh dunia. Forum ini aktif membahas isu-isu IFRS *Accounting Standards* dari berbagai belahan dunia.

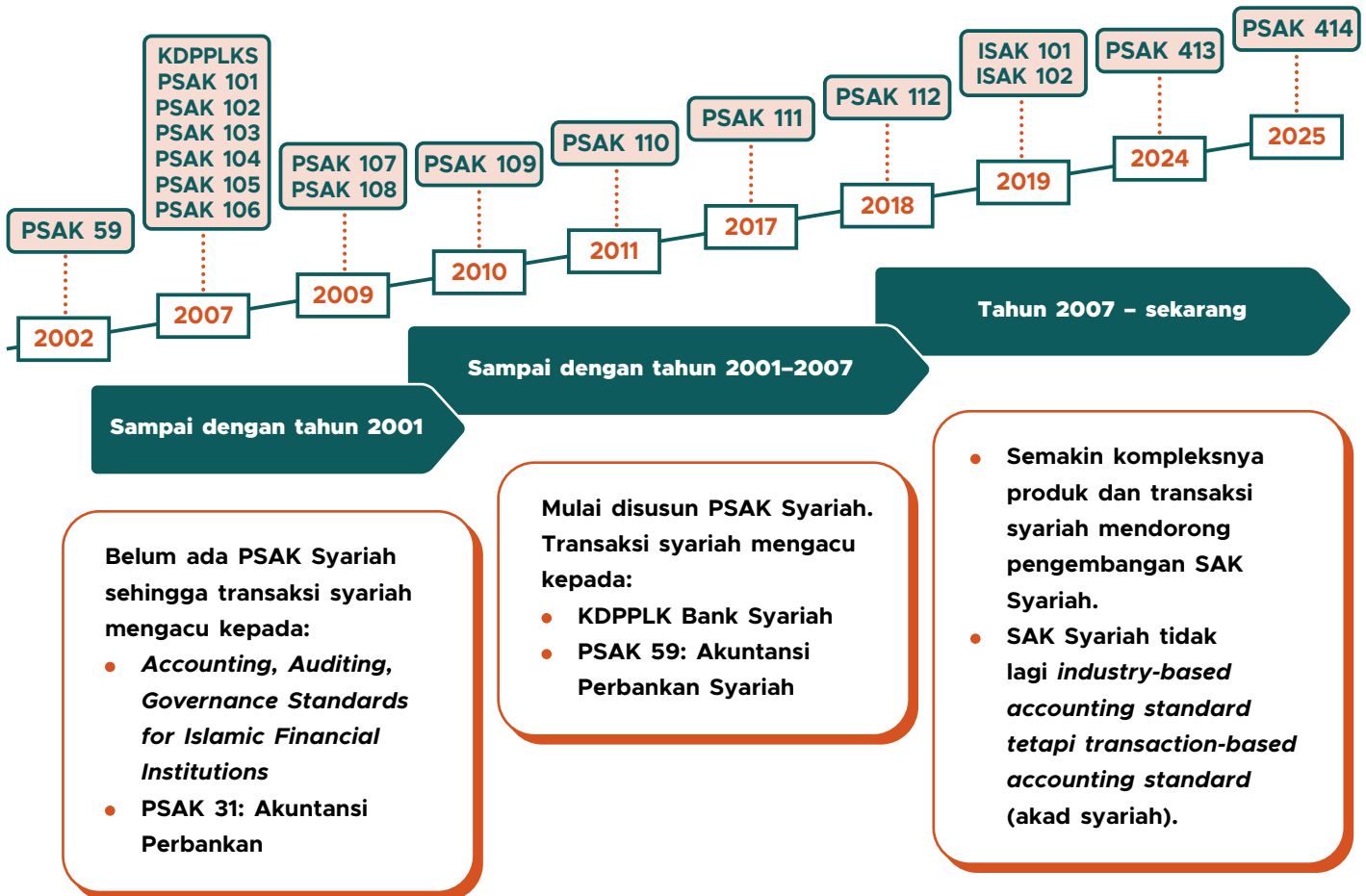
17 pertemuan IFASS telah diikuti.

World Standard-Setters Conference (WSS)

Konferensi internasional yang bertujuan untuk membahas isu konvergensi IFRS *Accounting Standards*, praktik implementasi IFRS *Accounting Standards*, mendapatkan update atas perkembangan IFRS *Accounting Standards*, memberikan rekomendasi kepada IASB atas agenda pengembangan IFRS *Accounting Standards*.

8 pertemuan WSS telah diikuti.

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH



PSAK SYARIAH MENDORONG PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Pengembangan SAK Syariah

Aktivitas ekonomi berbasis syariah di Indonesia yang dinamis, khususnya keuangan syariah, memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Salah satunya adalah standar akuntansi keuangan yang mencerminkan esensi aktivitas tersebut. Infrastruktur pendukung ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan ekonomi berbasis syariah.

Keberhasilan pengembangan SAK transaksi berbasis syariah yang dilakukan IAI ditandai dengan keluarnya PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* pada 2002. Seiring dengan berkembangnya fatwa, industri berbasis syariah, dan perkembangan SAK berbasis IFRS mendorong SAK Syariah terus untuk berkembang. Pengaturan SAK Syariah saat ini tidak hanya mencakup sektor keuangan syariah tetapi sudah mengakomodir sektor ril dan transaksi sosial berbasis syariah.

Pengembangan SAK transaksi berbasis syariah terus dilaksanakan seiring pertumbuhan ekonomi syariah dan perkembangan fatwa terkini di Indonesia. Selama tahun 2015 - Juni 2025, DSAS IAI telah menyusun 4 PSAK Syariah dan 3 ISAK Syariah baru serta merevisi 9 PSAK Syariah.



PSAK Wakaf Mendorong Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan data dari Kementerian Agama pada tahun 2018, terdapat 49.030 Ha tanah wakaf yang tersebar di 351.512 lokasi di Indonesia. Mayoritas penggunaan tanah wakaf adalah untuk masjid, musholla, sekolah, dan kegiatan sosial lainnya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan bahwa potensi wakaf di Indonesia diperkirakan sekitar Rp180 triliun. Wakaf memiliki potensi menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui alternatif pendanaan dari dana sosial masyarakat yang kemudian dapat diinjeksi untuk menopang aktivitas ekonomi di sektor komersial dan sosial.

Menyadari pentingnya peran wakaf dalam pembangunan nasional, di tahun 2018 DSAS IAI telah menyusun PSAK 112: *Akuntansi Wakaf*. PSAK 112 memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh entitas nazhir dan wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum.

Penyusunan standar akuntansi ini dilakukan melalui FGD dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti BWI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), peneliti wakaf, IAI KASy, dan lembaga penerima zakat, infak, wakaf, dan sedekah. PSAK ini berlaku efektif pada 1 Januari 2021.

Penyusunan PSAK Penurunan Nilai atas Aset yang Berasal dari Transaksi Berbasis Syariah

Pada tahun 2018 DSAS IAI mulai melakukan penyusunan PSAK penurunan nilai secara syariah yang akan mengatur mengenai akuntansi penurunan nilai atas aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. Penyusunan PSAK ini merupakan respon atas adopsi IFRS 9 menjadi PSAK 109 yang berlaku efektif per 1 Januari 2020.

Proses penyusunan PSAK penurunan nilai secara syariah diawali dengan riset metodologi penurunan nilai secara syariah yang melibatkan DSN MUI, praktisi perbankan syariah, *special matter expert*, dan akademisi. Riset tersebut dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pemahaman atas praktik penurunan nilai saat ini di perbankan syariah, pendalaman konsep dan implementasi metodologi penurunan nilai di PSAK 109, dan formulasi metodologi penurunan nilai secara syariah.

Penyusunan PSAK ini mempertimbangkan metodologi penurunan nilai yang sesuai dengan prinsip syariah, kaidah akuntansi syariah, dan *international best practice*. Penyusunan PSAK Penurunan nilai ini akan dilakukan dalam 3 fase yaitu fase pertama akan mengatur penurunan nilai atas aset keuangan yang berasal dari akad jual beli (*debt instrument*), fase kedua atas aset keuangan berasal dari akad kemitraan (*equity instrument*) dan fase ketiga atas aset non-keuangan (*non-financial asset*). DSAS IAI telah mengesahkan PSAK tersebut pada tahun 2024 dengan nama PSAK 413: *Penurunan Nilai*.

Peran dan Keterlibatan IAI dalam Standar Akuntansi Syariah Internasional

Keterlibatan dan pengaruh IAI dalam penyusunan standar akuntansi internasional, tidak hanya untuk pengaturan akuntansi transaksi konvensional, namun juga transaksi syariah. Hal ini dibuktikan ketika IAI menjadi penyelenggara pertemuan perdana *International Finance Consultative Group* (IFCG) pada tahun 2017. IFCG merupakan forum diskusi yang dibentuk IASB dalam perumusan akuntansi syariah internasional.

Diketahui hingga saat ini standar akuntansi IFRS yang disusun IASB belum mencakup pengaturan akuntansi untuk transaksi syariah yang memiliki keunikan tersendiri sehingga membutuhkan pengaturan khusus.

Dalam rapat tersebut IAI menekankan pentingnya standar akuntansi yang dapat mencerminkan keunikan transaksi syariah. Rapat internasional tersebut dihadiri oleh perwakilan IAI, IASB, *Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), serta penyusun standar akuntansi dari Malaysia, Pakistan, Dubai, dan Arab Saudi. Hingga saat ini, IAI aktif dalam forum IFCG yang dibentuk oleh IASB tersebut.

Working Group Penyusunan Revisi PSAK 409: Akuntansi zakat, infak, dan sedekah

DSAS IAI telah melakukan *post implementation review* atas PSAK 409: *Akuntansi zakat, infak, dan sedekah* (PIR PSAK 409) pada tahun 2020. Tujuan PIR PSAK 409 adalah untuk memperoleh masukan mengenai tantangan, kendala, dan permasalahan yang muncul dalam penerapan PSAK 409. Hal ini akan menjadi pertimbangan DSAS IAI dalam mengevaluasi pengaturan dalam PSAK 409.

Sebagai tindak lanjut PIR PSAK 409, DSAS IAI membentuk tim kerja untuk memberikan usulan revisi PSAK 409 yang terdiri dari Komisi Fatwa MUI, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional, Forum Zakat dan Akademisi untuk membahas aspek akuntansi atas isu yang muncul dari kegiatan PIR PSAK 409.

Penyusunan PSAK Wakalah dan Revisi PSAK 410: Akuntansi Sukuk

DSAS IAI sedang menyusun PSAK tersendiri yang mengatur akad wakalah. Saat ini sedang dilakukan kajian internal untuk menentukan substansi akad wakalah secara syariah dan penerapan akad wakalah di praktik, khususnya industri keuangan syariah. PSAK wakalah ini merupakan pengaturan akuntansi wakalah secara umum. Akad wakalah secara spesifik telah diatur dalam PSAK yang telah dikeluarkan DSAS IAI, seperti dalam PSAK 402: *Akuntansi Murabahah* dan PSAK 408: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*.

PSAK wakalah ini akan menjadi acuan revisi atas PSAK 410: *Akuntansi Sukuk* yang akan mengatur sukuk wakalah, selain sukuk mudharabah dan sukuk ijarah yang telah diatur dalam PSAK 410 saat ini.

Rencana ke Depan

1

MELANJUTKAN PROGRAM KONVERGENSI IFRS ACCOUNTING STANDARDS

DSAK IAI akan konsisten melanjutkan proses konvergensi IFRS *Accounting Standards* yang saat ini umumnya memiliki perbedaan satu tahun antara SAK dengan IFRS *Accounting Standards*.

2

SAK INTERNASIONAL

DSAK IAI telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Internasional, Tata Nama/Nomenklatur SAK dan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Internasional adalah pilar baru dari SAK yang merupakan adopsi penuh dari IFRS *Accounting Standards*. Ketiganya berlaku efektif per 1 Januari 2024.

3

SAK ENTITAS PRIVAT

SAK Entitas Privat akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dan berlaku efektif 1 Januari 2025.

4

PROGAM ADOPSI IFRS SUSTAINABILITY DISCLOSURE STANDARDS

DSK IAI akan melakukan proses adopsi IFRS Sustainability Disclosure Standards di tahun 2025. DSK IAI juga akan senantiasa berkoordinasi dengan regulator dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keterterapan di Indonesia.

5

STAKEHOLDERS

Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan konvergensi IFRS *Accounting Standards*.

6

SOSIALISASI & WORKING GROUP

Melaksanakan sosialisasi SAK kepada pemangku kepentingan serta berpartisipasi dalam WG SAK Entitas Privat, WG PSAK 117 dan WG Perpajakan terkait PSAK 109, PSAK 115 dan PSAK 116. DSAK IAI dan TISAK IAI juga berencana untuk terlibat dalam WG Perpajakan terkait PSAK 117.

7

SAK SYARIAH

DSAS IAI akan menyusun dan merevisi beberapa PSAK Syariah, antara lain penyusunan PSAK Penurunan Nilai, PSAK Wakalah Bi Al-Istitsmar, Revisi KDPPLKS, dan sebagainya. Selain itu DSAS IAI akan menerbitkan PSAK Syariah berbahasa Inggris untuk mempromosikan SAK Syariah Indonesia secara global.

8

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Meningkatkan pengaruh IAI dalam penyusunan standar akuntansi internasional untuk transaksi konvensional dan syariah.

PENGEMBANGAN

SAK

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

— & —

SPK

STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN

2025



PROGRAM KERJA

- 1 Penerbitan SAK Berbasis IFRS *Accounting Standards* dan PSAK/ISAK Lokal
- 2 Penerbitan Produk non-SAK
- 3 Pembahasan Surat Publik
- 4 Pembahasan Isu Akuntansi Bersama Pemangku Kepentingan
- 5 Sosialisasi Produk DSAK kepada Publik
- 6 Partisipasi sebagai Narasumber di Seminar Nasional dan Internasional
- 7 Partisipasi di Forum Regional dan Internasional
- 8 Pemberian tanggapan atas *Exposure Draft*, *Discussion Paper*, *Request for Information*

1. Penerbitan SAK Berbasis IFRS *Accounting Standards* dan PSAK/ISAK Lokal

Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*)

Sebagai bagian dari *due process procedure* dalam penyusunan dan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sepanjang tahun 2025 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyelenggarakan serangkaian Dengar Pendapat Publik secara daring untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi antara DSAK IAI dengan praktisi, akademisi, regulator, serta pengguna laporan keuangan, sehingga memastikan bahwa setiap rancangan standar yang diterbitkan relevan, dapat diterapkan, dan menjawab kebutuhan pengguna.

Pada 15 Mei 2025, DSAK IAI menyelenggarakan Dengar Pendapat Publik atas DE PSAK 119 serta DE Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107, yang berhasil menarik partisipasi sekitar 300 peserta. Selanjutnya, pada 12 September 2025, dilakukan Dengar Pendapat Publik atas DE PSAK 338 dengan partisipasi terbesar pada tahun tersebut, yaitu sekitar 500 peserta. Rangkaian kegiatan ditutup dengan Dengar Pendapat Publik DE PSAK 119 pada 14 Oktober 2025, yang dihadiri oleh sekitar 184 peserta. Antusiasme dan kualitas masukan dari peserta sepanjang kegiatan ini menjadi kontribusi penting dalam penyempurnaan standar, sekaligus mencerminkan komitmen DSAK IAI untuk menjaga proses pengembangan SAK yang transparan, inklusif, dan akuntabel.

Dengar Pendapat Terbatas (*Limited Hearing*)

Sebagai langkah untuk memperdalam pemahaman atas isu-isu teknis dan mengumpulkan masukan yang lebih terfokus, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyelenggarakan serangkaian Dengar Pendapat Terbatas selama tahun 2025. Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh pandangan mendalam dari kelompok pemangku kepentingan tertentu yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung terhadap dampak penerapan standar, sehingga hasil pembahasan dapat memberikan kontribusi substansial pada penyempurnaan rancangan standar.

Dengar Pendapat Terbatas atas DE PSAK 118 dilaksanakan dalam tiga sesi terpisah. Sesi pertama berlangsung pada 31 Januari 2025 bersama perwakilan regulator untuk membahas implikasi kebijakan dan aspek pengawasan. Sesi kedua diselenggarakan pada 7 Februari 2025 dengan melibatkan perwakilan kantor akuntan publik dan asosiasi profesi guna memperoleh perspektif praktis terkait auditabilitas dan implementasi teknis. Sesi terakhir dilakukan pada 13 Februari 2025 bersama perwakilan investor dan penyusun laporan keuangan, yang memberikan pandangan penting mengenai dampak informasi terhadap pengambilan keputusan serta kesiapan entitas dalam menerapkan standar.

Penerbitan Produk SAK

Produk SAK yang telah disahkan oleh DSAK IAI sepanjang periode 2024 beserta tanggal efektif adalah sebagai berikut:

PRODUK	TANGGAL PENGESAHAN	TANGGAL EFEKTIF
PSAK 118: <i>Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan</i>	28 Mei 2025	1 Januari 2027
Amendemen PSAK 109: <i>Instrumen Keuangan</i> dan PSAK 107: <i>Instrumen Keuangan: Pengungkapan</i> tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam	7 Agustus 2025	1 Januari 2026
PSAK 119: <i>Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan</i>	27 Agustus 2025	1 Januari 2027
PSAK 338: <i>Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Revisi 2025)</i>	29 Oktober 2025	1 Januari 2026
Amendemen PSAK 119: <i>Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan</i>	24 November 2025	1 Januari 2027

2. Penerbitan Produk non-SAK

Terdapat 6 produk non-SAK yang telah disahkan oleh DSAK IAI sepanjang periode 2025 yaitu:

PRODUK	TANGGAL PENGESAHAN	RINGKASAN
Buletin Implementasi Volume 6	7 Agustus 2025	Memberikan panduan penerapan PSAK 208 dalam menetapkan kebijakan akuntansi ketika tidak terdapat ketentuan spesifik dalam SAK Indonesia, termasuk uraian proses tiga langkah dalam pengembangan kebijakan akuntansi.
<i>Buletin Implementasi Volume 7</i>	27 Agustus 2025	Menyajikan pembahasan atas berbagai isu akuntansi, antara lain terkait dampak iklim, jaminan atas kewajiban pihak lain, pembayaran berbasis kelanjutan hubungan kerja, serta pengungkapan pendapatan dan beban pada segmen operasi.
Buletin Implementasi Volume 8	27 Agustus 2025	Menjelaskan perlakuan akuntansi terkait kepemilikan dan penitipan aset kripto.
Buletin Implementasi Volume 9	24 September 2025	Memberikan panduan mengenai identifikasi risiko dan penilaian kriteria highly probable untuk menetapkan suatu item sebagai hedged item, serta isu terkait lainnya.
Buletin Implementasi Volume 10	Desember 2025	Merupakan kompilasi produk non-standar DSAK IAI sebelum Februari 2023, mencakup siaran pers, buletin teknis, dan materi edukasi yang membahas berbagai topik seperti akuntansi PKBL BUMN, revaluasi aset tetap, dampak pandemi Covid-19 terhadap beberapa PSAK, pelepasan HGB di atas HPL, dan pengatribusian imbalan kerja.
Buletin Implementasi Volume 11	Desember 2025	Menyediakan penjelasan teknis mengenai pengukuran awal instrumen utang yang memiliki tingkat bunga di bawah suku bunga bebas risiko.

3. Pembahasan Surat Publik

Sepanjang tahun 2025, DSAK IAI menerima berbagai surat publik yang mencerminkan tingginya perhatian pemangku kepentingan terhadap konsistensi dan kejelasan penerapan Standar Akuntansi Keuangan. Beragam isu yang diajukan melalui surat publik tersebut menjadi masukan berharga dalam proses pengembangan standar, sekaligus menunjukkan dinamika praktik akuntansi yang membutuhkan arahan teknis lebih lanjut.

Topik yang disampaikan melalui surat publik selama tahun 2025 cukup beragam, mencakup permintaan klarifikasi atas penerapan akuntansi dalam regulasi terkini; pertanyaan mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi yang melibatkan pengelolaan tanah dan hak atas tanah; isu perpindahan pilar pelaporan keuangan dari SAK Indonesia ke SAK ETAP; kebutuhan akan standarisasi format laporan keuangan; permohonan penjelasan mengenai pencatatan instrumen investasi tertentu; pertanyaan mengenai penyederhanaan laporan keuangan melalui mekanisme penggabungan atau konsolidasian; hingga permintaan pendapat terkait perlakuan akuntansi atas instrumen utang khusus.

Untuk menindaklanjuti surat publik tersebut, DSAK IAI melakukan serangkaian langkah strategis mulai dari diskusi internal, penyelenggaraan *focus group discussion* (FGD), hingga pembahasan bersama *stakeholders* terkait. Dalam beberapa kasus, ketika isu yang diangkat memiliki dampak yang luas ataupun menimbulkan kebutuhan akan pedoman praktis yang lebih jelas, DSAK IAI menerbitkan produk non-SAK yang relevan untuk memberikan kejelasan bagi para penyusun laporan keuangan.

4. Pembahasan Isu Akuntansi Bersama Pemangku Kepentingan

PIR ISAK 335: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*

Pada awal 2025, DSAK IAI memulai kajian mendalam atas penerapan ISAK 335 melalui penerbitan *Discussion Paper* PIR ISAK 335 serta penyelenggaraan dua FGD pada 22 April dan 14 Mei 2025. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi nirlaba, filantropi, akademisi, auditor, asosiasi profesi, dan media yang memberikan perspektif beragam terkait tantangan implementasi. Temuan FGD menunjukkan bahwa sebagian besar isu yang muncul bukan berasal dari ketidaktepatan konsep dalam standar, tetapi lebih banyak terkait praktik penyajian laporan keuangan, kebutuhan pelaporan khusus dari donor, perbedaan istilah dalam regulasi perpajakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta pemahaman terhadap contoh ilustratif yang memang tidak dirancang untuk mencakup semua variasi kondisi. Di samping itu, isu seperti klasifikasi aset neto, penamaan laporan, interaksi dengan standar lain, serta kebutuhan informasi tambahan diyakini dapat diselesaikan melalui pengungkapan yang memadai atau penyusunan laporan dengan tujuan khusus.

PIR PSAK 116: Sewa

Sebagai bagian dari proses *post-implementation review*, DSAK IAI menerbitkan *Discussion Paper* PIR PSAK 116 pada Agustus 2025 untuk menilai efektivitas penerapan PSAK 116: Sewa. Publikasi ini kemudian dikaji lebih lanjut melalui FGD secara daring pada 25 Agustus 2025 yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari sektor telekomunikasi, teknologi digital, transportasi, logistik, energi, pertambangan, hingga ritel. Hasil diskusi menunjukkan bahwa PSAK 116 secara umum telah memenuhi tujuannya dalam menyediakan informasi relevan bagi pengguna laporan keuangan. Namun demikian, terdapat beberapa area yang tetap membutuhkan klarifikasi teknis, seperti penetapan jangka waktu sewa yang mempertimbangkan *enforceability* hukum dan implikasi ekonomi, interaksi antara PSAK 116 dan PSAK 115 pada transaksi jual-beli dan sewa balik, serta perbedaan antara transaksi sewa dan transaksi jual atau beli.

Implementasi PSAK 117: Kontrak Asuransi

Sepanjang tahun 2025, DSAK IAI terlibat secara intens dalam kelompok kerja implementasi PSAK 117 yang dipimpin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi ini mencakup lima belas pertemuan yang juga melibatkan berbagai institusi terkait, antara lain Kementerian Keuangan, AAUI, AAJI, PAI, dan IAPI. Pembahasan dalam kelompok kerja berfokus pada delapan isu utama implementasi, seperti penilaian risiko kredit atas piutang premi, ketentuan mengenai pengalihan portofolio kontrak asuransi, penggunaan pendekatan nilai wajar pada transisi, hingga penentuan arus kas pemenuhan. Diskusi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif atas tantangan industri dan memastikan bahwa penerapan PSAK 117 berlangsung konsisten serta selaras dengan tujuan pelaporan keuangan.

Kajian Jaminan Sosial

Penerapan PSAK 117: *Kontrak Asuransi* pada program asuransi sosial masih menghadapi berbagai tantangan dan kerumitan. Untuk memahami isu tersebut, DSAK IAI telah melakukan kajian melalui 11 sesi FGD bersama beragam pemangku kepentingan, mulai dari badan pengelola, akademisi, hingga regulator, guna mengeksplorasi konsep dan praktik penyelenggaraan asuransi sosial di Indonesia. Asuransi sosial sendiri bersifat wajib, nirlaba, dan berfokus pada perlindungan sosial, dengan mekanisme pengelolaan risiko secara kolektif serta tingkat intervensi pemerintah yang tinggi. Karakteristik tersebut berbeda secara mendasar dari kontrak asuransi dalam PSAK 117. Temuan kajian ini akan menjadi landasan dalam menentukan model akuntansi yang paling tepat untuk program asuransi sosial.

Partisipasi di *Focus Group Discussion* (FGD)

DSAK IAI juga aktif menjadi narasumber dan partisipan dalam berbagai FGD berikut ini:

TANGGAL	TOPIK FGD
14 Mei 2025	SAK untuk Lembaga Keuangan Mikro
14 Mei 2025	Perlakuan Akuntansi atas Kegiatan Usaha Bullion
22 Mei 2025	<i>Future of Finance and Accounting Profession in Turbulence Era</i>
23 Mei 2025	Perkembangan Standar Akuntansi Terkini di Indonesia dan Australia
15 Oktober 2025	Kebutuhan Informasi Keuangan atas Program Jaminan Sosial
28 November 2025	Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013
5 Desember 2025	Taksonomi Nasional - <i>Financial Reporting Single Window</i>
10 & 29 Desember 2025	Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan BUMN dalam LKBUN/LKPP Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2025

5. Sosialisasi Produk DSAK kepada Publik

Untuk memberikan pemahaman kepada publik atas penerbitan berbagai produk SAK dan produk lain terkait SAK, DSAK IAI telah melakukan berbagai sosialisasi kepada publik:

TANGGAL	JUDUL SOSIALISASI	MEDIA
30 April 2025	<i>Regular Accounting Discussion</i> (RAD) dengan tema “Penerapan Akuntansi Entitas Investasi”	Virtual – Zoom Webinar, dan Live Streaming Youtube IAI
2 Juli 2025	Sosialisasi PSAK 118	Virtual – Zoom Webinar, dan Live Streaming Youtube IAI
27 Agustus 2025	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akuntansi Aset Kripto	Luring di OJK
12 September 2025	Sosialisasi <i>Buletin Implementasi</i> Volume 6-7	Virtual – Zoom Webinar, dan Live Streaming Youtube IAI
14 Oktober 2025	Sosialisasi <i>Buletin Implementasi</i> Volume 8-9	Virtual – Zoom Webinar, dan Live Streaming Youtube IAI
18 November 2025	Sosialisasi Impairment sesuai PSAK 109 dengan OJK pembiayaan Khusus	Luring di OJK
20 Desember 2025	Sosialisasi <i>Overview</i> PSAK 117 dengan IAI Wilayah DKI Jakarta	Luring di Jakarta

6. Partisipasi sebagai Narasumber di Seminar Nasional dan Internasional

DSAK IAI terlibat aktif dalam berbagai seminar nasional maupun internasional yang membahas mengenai penerapan serta isu-isu terkait standar akuntansi keuangan:

TANGGAL	KEGIATAN
22 Februari 2025	<i>Webinar IMAI Gorontalo 2nd International Conference of Accounting</i>
9 Oktober 2025	RASHID: Aset Kripto dalam Perspektif Syariah dan Akuntansi

7. Partisipasi di Forum Regional dan Internasional

DSAK IAI terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dan forum internasional sebagai berikut:

TANGGAL	KEGIATAN
Daring, 12-14 Maret 2025	<i>International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) Meeting di Naples, Italy</i>
Daring, 7-8 Mei 2025	<i>Emerging Economies Group (EEG) Meeting</i> diselenggarakan secara virtual
Luring, 28 September – 1 Oktober 2025	<i>Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG) Interim, World Standard Setters (WSS), dan IFASS</i> di London, Inggris
Luring, 3-4 November 2025	<i>EEG Meeting</i> di Seoul, Korea Selatan
Luring, 27-28 November 2025	<i>17th AOSSG Annual Meeting di Villa Nautica, Maldives</i>

8. Pemberian tanggapan atas *Exposure Draft*, *Discussion Paper*, *Request for Information*

Sepanjang periode 2025, DSAK IAI juga aktif memberikan tanggapan atas *Exposure Draft* (ED)/*Discussion Paper* (DP), dan *Request for Information* (Rfi) yang diterbitkan oleh IASB sebagai berikut:

JUDUL DOKUMEN	TANGGAL TANGGAPAN
<i>Exposure Draft: Equity Method of Accounting—IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures</i>	20 Januari 2025
<i>Tentative Agenda Decision: Assessing Indicators of Hyperinflationary Economies (IAS 29)</i>	24 Januari 2025
<i>Tentative Agenda Decision: Recognition of Intangible Assets Resulting from Climate-related Expenditure (IAS 38)</i>	24 Januari 2025
Exposure Draft: Provisions—Targeted Improvements Materi atas ED dapat diunduh melalui tautan	12 Maret 2025
<i>Tentative Agenda Decision: Embedded Prepayment Option (IFRS 9)</i>	6 Oktober 2025
<i>Tentative Agenda Decision: Determining and Accounting for Transaction Costs (IFRS 9)</i>	6 Oktober 2025
<i>Tentative Agenda Decision: Updates to Committee's agenda decisions for IFRS 18</i>	6 Oktober 2025
<i>Request for Information: Post-implementation Review of IFRS 16 Leases</i>	15 Oktober 2025
<i>Tentative Agenda Decision: Economic Benefits from Use of a Battery under an Offtake Arrangement (IFRS 16)</i>	25 November 2025
<i>Tentative Agenda Decision: Classification of a Foreign Exchange Difference from an Intragroup Monetary Liability (or Asset) (IFRS 18)</i>	25 November 2025



Tim Implementasi Standar Akuntansi Keuangan IAI (TISAK IAI) merupakan lembaga yang memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat atas SAK melalui berbagai kegiatan sosialisasi, diskusi, diseminasi, pendidikan, pelatihan, dan aktivitas terkait lainnya. Selain itu, TISAK IAI juga dapat memberikan rekomendasi kepada DPN IAI, DKSAK IAI, dan DSAK IAI dalam menanggapi isu, konsultasi, serta permasalahan implementasi SAK. TISAK IAI juga berwenang melakukan penelitian dan kajian untuk mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan dalam penerapan SAK.

Selama tahun 2025, TISAK IAI melakukan berbagai kegiatan sosialisasi maupun seminar, antara lain:

TANGGAL	KEGIATAN
2 Februari 2025	Narasumber IAI Goes to Campus - Webinar Universitas Ngudi Waluyo: Update PSAK
30 April 2025	Moderator RAD: Penerapan Akuntansi Entitas Investasi
1 Oktober 2025	Narasumber Workshop MAPPI - Memahami Laporan Keuangan Dalam Penilaian
20 Oktober 2025	Narasumber Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Buletin Implementasi Volume 8 tentang Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas
10 November 2025	Narasumber In House Training (IHT) Bursa Efek Indonesia PSAK Refreshment (PSAK 110 dan PSAK 113)
14 November 2025	Narasumber Sosialisasi Menjaga Integritas Laporan Keuangan
28 November 2025	Narasumber Kuliah Umum Universitas Padjadjaran - Current Issue Perkembangan Akuntansi Keuangan



PROGRAM KERJA

Program Kerja DSAS IAI tahun 2025 merupakan kelanjutan dari rangkaian program DSAS IAI yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, yang mencakup diantaranya:

- 1 Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah.
- 2 Pembahasan surat publik.
- 3 Pembahasan isu akuntansi khusus bersama pemangku kepentingan.
- 4 Partisipasi sebagai narasumber dalam seminar nasional.
- 5 Partisipasi di forum internasional.
- 6 Program lain.

1. Penyusunan SAK Syariah

Selama periode 2024, DSAS IAI telah mengesahkan PSAK 413 tentang Penurunan Nilai pada 24 Juli 2024 dan mengesahkan Draf Eksposur PSAK 414 tentang Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat pada 18 Desember 2024. Masih berproses penyusunan 3 (tiga) PSAK Syariah yang masih dalam penyusunan yaitu:

- Revisi PSAK 408: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah;
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat; dan
- Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah sebagai dampak disahkannya IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* pada April 2024; dan

Kedua tim baru ini, akan memulai kajiannya pada awal kuartal satu tahun 2025.

2. Pembahasan Surat Publik

Salah satu tugas yang diberikan kepada DSAS IAI adalah untuk melakukan pembahasan atas surat publik yang diterima. DSAS IAI menerima surat publik terkait dengan isu interpretasi, implementasi maupun pemahaman atas Standar Akuntansi Syariah. Kemudian melakukan kajian dan analisa atas surat publik yang diterima, hanya surat yang memenuhi kriteria pembahasan surat publik yang akan dibahas dan ditanggapi oleh DSAS IAI.

Selama tahun 2025, DSAS IAI telah menerima satu surat mengenai pendapat atas pengakuan wa'd mulzim pada REPO Syariah.

3. Pembahasan Isu Akuntansi Khusus Bersama Pemangku Kepentingan

DSAS IAI juga aktif dalam melakukan pembahasan berbagai macam isu akuntansi bersama para pemangku kepentingan di Indonesia seperti, regulator, asosiasi, maupun institusi yang relevan baik dalam bentuk *Working Group* (WG) maupun *Focus Group Discussion* (FGD). Pembahasan isu akuntansi yang dilakukan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kelompok Kerja PSAK 408

DSAS IAI membentuk kelompok kerja (*working group*) PSAK 408 yang anggotanya berasal dari OJK, DSN MUI, asosiasi dan industri syariah, aktuaris, dan akuntan publik.

Tujuannya untuk memberikan rekomendasi poin perubahan terhadap PSAK 408. Tahapan pembahasan sebagai berikut:

- Pendalaman dan penerapan IFRS 17 pada perusahaan asuransi di luar negeri termasuk keterterapan pada transaksi asuransi syariah.
- Komparasi PSAK 408 dan PSAK 117.
- Identifikasi isu-isu akuntansi transaksi asuransi syariah.
- Pembahasan isu-isu, termasuk aspek syariah dan akad-akad yang menjadi dasar transaksi asuransi syariah.
- Kesimpulan dan rekomendasi.

Kelompok kerja telah melakukan dua kali diskusi sampai akhir Desember 2024 yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024 dan 8 November 2024.

Narasumber *Focus Group Discussion* (FGD)

DSAS IAI juga menjadi narasumber berbagai FGD sebagai berikut:

TANGGAL	TOPIK FGD	HOST
18 Mar 2025	Implementasi DE PSAK 414 pada BPRS	OJK
20 Jun 2025	Produk Investasi Perbankan Syariah	OJK
18 Sep 2025	FGD Bank Indonesia terkait Pendalaman Aspek Syariah atas Pasar Uang & Valuta Asing Syariah	BI
2 Okt 2025	Perlakuan akuntansi ijarah atas jasa tidak langsung	OJK

4. Partisipasi sebagai Narasumber dalam Seminar Nasional

DSAS IAI terlibat aktif dalam berbagai seminar nasional yang membahas mengenai penerapan serta isu-isu terkait standar akuntansi syariah.

TANGGAL	JUDUL SOSIALISASI	PESERTA
20 Feb 2025	PSAK Syariah for Academics tentang "Wakaf Saham"	Umum – Zoom Webinar
18 Jun 2025	PSAK Syariah for Academics tentang "Aset Kelolaan pada Lembaga Zakat"	Umum – Zoom Webinar
4 Sep 2025	PSAK Syariah for Academics tentang "Penurunan Nilai atas Aset Keuangan Syariah"	Umum – Zoom Webinar
25 Sep 2025	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah X Tahun 2025	Dewan Pengawas Syariah - Tatap Muka
7 Okt 2025	Workshop PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) "Skema Pembiayaan Syariah Badan Layanan Umum"	PT SMI - Tatap Muka
22 Des 2025	Sosialisasi PSAK 401 & ISAK 403	Umum – Zoom Webinar

5. Partisipasi di Forum Internasional

Selama tahun 2025, DSAS IAI melakukan 1 (satu) kegiatan internasional yakni kunjungan dari Malaysia yaitu Association of Malay Chartered Accountant Firms (AMCAF)

6. Program lain

Pada akhir Kuartal empat tahun 2025 DSAS IAI memulai proses penerjemahan PSAK Syariah kedalam bahasa Inggris. Proses penerjemahan tetap mengacu pada istilah akuntansi dalam bahasa Inggris yang berlaku di internasional. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia ke ranah Internasional.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Telah terbit

SPK

STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN

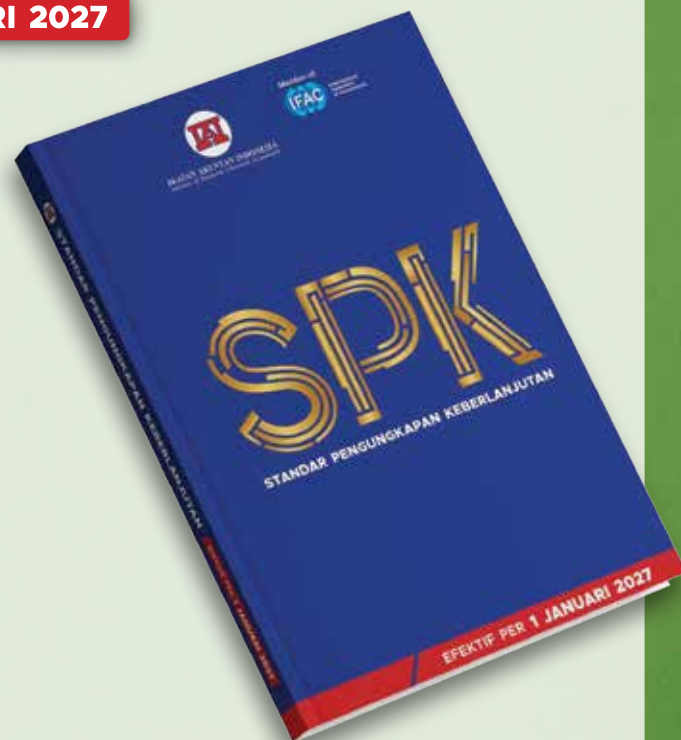
EFEKTIF PER 1 JANUARI 2027

Buku “Standar Pengungkapan Keberlanjutan Efektif per 1 Januari 2027” merupakan standar pengungkapan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan IAI (DSK IAI).

Disusun dengan mengacu pada IFRS Sustainability Disclosure Standards yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), buku SPK ini mencakup standar pengungkapan keberlanjutan yang terdiri dari:

- PSPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan.
- PSPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim.

Dengan adanya publikasi ini, pengguna dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempunyai panduan utama dalam praktik pengungkapan keberlanjutan yang transparan dan akuntabel.



<https://linktree/IAIakuntan>

Pemesanan secara online melalui email:

gerai@iaiglobal.or.id
fazri.reza@iaiglobal.or.id



WA Official IAI
08 111 054 141



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



PROGRAM KERJA

Program Kerja DSK IAI tahun 2025 mencakup diantaranya:

- 1 Penerbitan Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS Sustainability Disclosure Standards
- 2 Sosialisasi
- 3 Partisipasi di Forum Regional dan Internasional

1. Penerbitan Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS Sustainability Disclosure Standards

Pada 3 Desember 2024, secara resmi IAI telah menerbitkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (Peta Jalan SPK). IAI menyadari bahwa penerapan SPK tidak hanya sebatas penyusunan standar. Penerapan SPK memerlukan ekosistem laporan keberlanjutan yang memadai. Strategi penerapan SPK yang komprehensif dan terarah sangat penting karena SPK merupakan inisiatif baru di Indonesia. Tanpa adanya panduan strategis yang jelas, maka penerapan SPK berisiko menghadapi beragam tantangan dan hambatan, seperti ketidaksiapan perusahaan, kurangnya pemahaman di kalangan pemangku kepentingan, dan keterbatasan infrastruktur pendukung.

Pembentukan ekosistem yang mendukung dalam penerapan SPK ini mencakup beragam aspek, seperti regulasi yang mendukung, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan yang memadai. Ekosistem laporan keberlanjutan saat ini belum sepenuhnya ada dan memadai dalam memastikan penerapan SPK yang efektif.

Dengan mempertimbangkan kondisi dan faktor di atas, IAI menerbitkan Peta Jalan SPK sebagai panduan strategis yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan komitmen keberlanjutan di Indonesia. Penerapan SPK juga diharapkan membantu berbagai entitas dalam mengakselerasi pemenuhan kebutuhan informasi bagi investor maupun kreditur. Selain itu, penerapan SPK diharapkan dapat memudahkan entitas dalam memperoleh pendanaan lokal maupun internasional.

Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) merupakan usulan dari Dewan Standar Keberlanjutan IAI yang disetujui oleh Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan IAI dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional IAI. Penyusunan Peta Jalan SPK melalui serangkaian proses sejak awal tahun 2024, termasuk tahap konsultasi dan tanggapan publik.

Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) telah mengesahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) pada 1 Juli 2025. SPK merupakan standar pengungkapan keberlanjutan yang melengkapi laporan keuangan. Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 1 (PSPK 1) tentang Persyaratan Umum Pengungkapan

Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan merujuk pada IFRS S1 *General Requirement for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. Sementara Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 2 (PSPK 2) tentang Pengungkapan terkait Iklim merujuk pada IFRS S2 *Climate-related Disclosure*.

PSPK 1 mengatur mengenai landasan konseptual, persyaratan umum, dan pertimbangan, ketidakpastian, dan kesalahan yang merupakan bagian dari pengaturan umum. Selain itu, PSPK 1 juga mengatur pengungkapan dalam bagian konten ini yang terdiri dari tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik dan target untuk informasi keuangan terkait keberlanjutan. Landasan konseptual mengatur mengenai konsep-konsep penyajian wajar, materialitas, entitas pelapor, dan informasi terhubung. Persyaratan umum mengatur mengenai sumber panduan, lokasi pengungkapan, waktu pelaporan, informasi komparatif, dan pernyataan kepatuhan.

PSPK 2 memiliki komponen konten inti yang serupa dengan PSPK 1, hanya saja dalam PSPK 2 secara spesifik terkait isu iklim. Fokus pengaturan dalam PSPK 2 meliputi ketahanan iklim, gas rumah kaca, metrik lintas industri, emisi yang dibiayai, dan lainnya.

Sepanjang penyusunan SPK, DSK IAI telah melaksanakan berbagai sosialisasi, audiensi, dan *forum group discussion* dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

NO	PRODUK	TANGGAL PENGESAHAN	TANGGAL EFEKTIF
1	PSPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan	1 Juli 2025	1 Januari 2027
2	PSPK 2 tentang Pengungkapan terkait Iklim	1 Juli 2025	1 Januari 2027

Dalam proses penyusunan SPK, DPSK IAI dan DSK IAI melakukan serangkaian kegiatan dengar pendapat terbatas dan dengar pendapat publik.

NO	TANGGAL	FGD
1	10 Januari 2025	Dengar pendapat terbatas dengan Regulator (OJK, BI, BPK, BPKP, BKF, dan PPPK)
2	20 Januari 2025	Dengar pendapat terbatas dengan Kementerian teknis (Kemen Lingkungan Hidup, Kemen BUMN, Kemen Bappenas, Kemen Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kemen ESDM)
3	21 Januari 2025	Dengar pendapat terbatas dengan Asosiasi Profesi dan Asosiasi Industri
4	11 Februari 2025	Dengar pendapat publik secara daring dan luring

Narasumber FGD

Selain menyelenggarakan berbagai FGD dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk mendapatkan informasi terkait pengungkapan keberlanjutan, DPSK IAI dan DSK IAI juga menjadi narasumber dalam FGD yang diadakan oleh institusi lain. Informasi yang dibahas pada FGD tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan SPK. Berikut adalah FGD yang dihadiri oleh DPSK IAI dan DSK IAI selama Januari sd Desember 2025:

NO	TANGGAL	FGD
1	24 Februari 2025	<i>Undangan Sosialisasi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 2</i>
2	06 Mei 2025	ACCA Roundtable on Sustainability Reporting Progress
3	22 Mei 2025	IAI-IFAC Focus Group Discussion - Future of Finance and Accounting Profession in Turbulence Era
4	03 Juni 2025	<i>Roundtable to discuss the ISSB's proposed amendments to IFRS S2 dengan ISSB</i>
5	13 Juni 2025	FGD OJK DPNP: Usulan Climate Scenario sebagai Dasar Penyusunan Panduan CRMS Versi 2
6	19 Juni 2025	FGD bersama dengan KPAP untuk membahas mengenai Pengaturan Sustainability Report dan Assurance
7	24-25 Juni 2025	<i>FGD OJK DPNP: Arah Kebijakan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan dan Tangguh terhadap Risiko Iklim (CRMS Versi 2)</i>
8	18 September 2025	<i>CPA Australia-AFA ESG Focus Group Discussion</i>
9	06 November 2025	<i>FGD KNEKS Islamic Sustainable Finance</i>

DSK IAI juga aktif memberikan tanggapan pada dokumen konsultasi publik yang diterbitkan oleh IASB sebagai salah satu bentuk kontribusi penyusunan standar internasional. Pemberian tanggapan ini juga memastikan suara Indonesia terwakilkan dalam proses penyusunan standar. Berikut adalah tanggapan yang dikirimkan kepada ISSB selama Januari sd Desember 2025:

NO	TANGGAL	FGD
1	27 Juni 2025	<i>Exposure Draft Amendments to Greenhouse Gas Emissions Disclosures (Amendments to IFRS S2)</i>
2	30 November 2025	<i>Exposure Draft Amendments to SASB Standards</i>

2. Sosialisasi

Saat ini telah terdapat berbagai macam standar atau framework pengungkapan berkelanjutan yang digunakan di Indonesia. IFRS Sustainability Disclosure Standards/ SPK merupakan standar baru yang belum banyak diketahui oleh publik. Oleh karena itu, DPSK IAI dan DSK IAI akan terus aktif meningkatkan pemahaman publik (capacity building) atas Standar ini dengan menerbitkan publikasi maupun melalui seminar (baik secara daring maupun luring) dan sesi edukasi. Berikut adalah kegiatan peningkatan pemahaman publik yang telah dilakukan selama Januari sd Desember 2025:

NO	TANGGAL	JUDUL KEGIATAN
1	10 Januari 2025	Webinar IAI-ISMS: Building Awareness toward IFRS S1 and IFRS S2 Adoption in Indonesia
2	22 Januari 2025	Kuliah Tamu FEB UI S1 Akuntansi Ekstensi - Analisa Laporan Keuangan
3	24 Januari 2025	Webinar IAI: Menggali Lebih Dalam IFRS S1&S2
4	12 Februari 2025	<i>Seminar ACCA - IAI: Preparing for Sustainability Reporting Indonesia and Global Best Practice</i>
5	21 Februari 2025	<i>Seminar IAI Wilayah Banten: Sustainability Reporting for Sustainable Business</i>
6	27 Februari 2025	Seminar IAI-CIMA-KPMG: Best ESG Practices in Banking Sector and Empowering Change Through ESG Practices for Accounting and Financial Professionals
7	17 April 2025	<i>Webinar KPAP-IAPI-IAI: Implementation of Sustainability Reporting in Indonesia</i>
8	25 Maret 2025	<i>IDX Channel: Live Segment "Market Review"</i>
9	21 April 2025	<i>KPMG Business Talk 2024</i>
10	13 Maret 2025	<i>ACIIA Regional Conference 2024</i>
11	30 April 2025	<i>Seminar OJK-IAI-WorldBank: Journeys Toward the Adoption of IFRS S1 and S2 in Indonesia</i>
12	22 Mei 2025	Webinar IAI-PPPK: Mendalami IFRS S1 dan S2
13	11 Jun1 2025	<i>IDX Net Zero Incubator: Climate Reporting</i>
14	24 Juli 2025	Webinar Universitas Syiah Kuala: Pekan Ilmiah Akuntansi ke-27
15	30 Juli 2025	<i>Webinar IAMI Wilayah Banten: Sustainability Reporting, Integrated Reporting & ESG Reporting</i>
16	01 Agustus 2025	<i>Seminar Universitas Padjadjaran: Padjadjaran Accounting Week</i>
17	11 Agustus 2025	<i>Seminar IAI Wilayah Banten: International ESG Aspects in Corporations and the Preparation of SR According to IFRS S1 and S2</i>
18	15 Agustus 2025	Webinar ICOSA: Pengenalan IFRS S1 & S2
19	24 September 2025	Seminar ESG Bankers Club: Navigating Change IFRS S1 and IFRS S2

NO	TANGGAL	JUDUL KEGIATAN
20	24 September 2025	Seminar OJK: Menyelaraskan Langkah & Aksi dalam Rangka Persiapan Adopsi Standar Pelaporan Keberlanjutan Berbasis IFRS S1 dan S2
21	29 September 2025	<i>Seminar HUT IAI ke 67: Issues and challenges faced by Industry in the Implementation of The Sustainability Disclosure and Reporting</i>
22	01 Oktober 2025	Workshop OJK: Penerapan Standar Pelaporan Keberlanjutan IFRS S1 dan S2: Pemahaman, Kesiapan dan Tantangan
23	13 Oktober 2025	<i>Workshop WWF: Road to Indonesia Nature-Positive Forum Workshop and TNFD Report Launch on Supporting Indonesia's Transition towards Nature-Positive</i>
24	29 Oktober 2025	Seminar Kick Off Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024 Pertamina: Paparan IFRS S1 dan S2
25	21 November 2025	Seminar Universitas Trisakti "Investasi dan Pembiayaan Berkelanjutan: Akuntansi dalam Menyikapi Isu Ekonomi Hijau dan Sustainable Finance di Indonesia
26	12 Desember 2025	Seminar PSPK 1 dan PSPK 2 IAI Wilayah Jatim

Segala kegiatan DSK IAI secara lengkap telah dirangkum dalam publikasi yang disebut sebagai DSK Terkini yang terbit melalui halaman website IAI pada tautan DSK Terkini.

IAI telah menerbitkan publikasi terkait pelaporan keberlanjutan secara rutin sejak November 2021. Publikasi tersebut memuat berbagai perkembangan terkini tentang pengungkapan berkelanjutan khususnya pelaporan keberlanjutan. Pada tahun 2025, IAI telah menerbitkan satu publikasi terkait keberlanjutan dengan judul *Seizing the Opportunities of Indonesia's Carbon Market for Climate Goal and Beyond*.

Selain melalui seminar dan publikasi, IAI juga melakukan sosialisasi melalui podcast. Podcast ini dapat disaksikan melalui Youtube dan juga Spotify IAI. Berikut adalah podcast yang telah dilakukan DSK IAI sepanjang Januari sd Desember 2025:

NO	TANGGAL RILIS	TOPIK PODCAST
1	03 Februari 2025	<i>Podcast Draf Eksposur PSPK 1 dan PSPK 2</i>
2	03 Februari 2025	Babak Baru <i>Sustainability</i> di Indonesia Peta Jalan dan Draft Standar
3	26 September 2025	Masa Depan Hijau Akuntan dan Carbon Removal

3. Partisipasi di Forum Regional dan Internasional

DPSK IAI dan DSK IAI berpartisipasi dalam forum regional maupun internasional. Forum internasional yang diikuti adalah International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS), World Standard-Setter (WSS), dan Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG).

Keterlibatan pada forum regional dan internasional tersebut akan mendapatkan update terkini dan insight baru dari standard setter negara lain. Berikut adalah keterlibatan DPSK IAI dan DSK IAI pada forum regional dan internasional selama Januari – Desember 2025:

NO	KEGIATAN REGIONAL/INTERNASIONAL	
1	International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) Meeting	<i>Virtual, 12-13 Maret 2025</i>
2	Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG) Interim Meeting	London, 28 September 2025
3	World Standard-Setters (WSS) Conference	London, 29-30 September 2025
4	International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) Meeting	London, 30 September – 1 Oktober 2025



IAI membentuk Tim Kerja Keberlanjutan (TKK) untuk mendukung DSK IAI. Dukungan berupa penelitian, analisis, dan penyusunan usulan tanggapan/rekomendasi atas perumusan dan implementasi standar keberlanjutan serta memberikan masukan kepada DSK IAI terkait isu penerapan standar keberlanjutan. Berikut ini adalah kegiatan TKK IAI selama Januari – Desember 2025.

NO	KEGIATAN REGIONAL/INTERNASIONAL	
Sosialisasi		
1	22 Januari 2025	Sesi Edukasi DE PSPK 1 dan DE PSPK 2
2	22 Februari 2025	Seminar Nasional 9th ACCRUED
3	26 Februari 2025	24th ATV International Seminar FEB UI
4	08 April 2025	Guest Lecture on Georgetown SFS Asia Pacific Policy Lab Class
5	26 Agustus 2025	National Conference Institute of Internal Auditors Indonesia 2025
6	12 September 2025	Undangan Narasumber Gadjah Mada Accounting Days 2025
7	20 Oktober 2025	Sosialisasi SPK bersama Bank Indonesia Wilayah Medan
8	25 Oktober 2025	Webinar Program Studi Magister Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat
9	06 November 2025	Sosialisasi SPK dan Kalkulator Hijau bersama Bank Indonesia Wilayah Surabaya
10	10 November 2025	Net Zero Incubator Bursa Efek Indonesia (BEI)
11	12 November 2025	Sosialisasi SPK dan Kalkulator Hijau bersama Bank Indonesia Wilayah Makassar
12	11 Desember 2025	Rencana Sosialisasi PSPK 1 dan PSPK 2 dengan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan RI
13	11 Desember 2025	Green Economic Outlook 2026 by Olahkarsa x ICSA
Narasumber FGD		
1	01 Juli 2025	TGS APAC Conference 2025 oleh TGS Asia Pacific
2	12 November 2025	Roundtable invitation - Provide feedback on ISSB's Exposure Drafts (SASB Standards)
Podcast		
1	16 Mei 2025	Climate Scenario Analysis

SAK Online

SPK, SPJA, Kode Etik Akuntan Indonesia, & SiPM KJA dapat di baca disini

sudah termasuk **PSAK berlaku efektif 1 Januari 2025**
dan setelahnya, & **PSPK berlaku efektif 1 Januari 2027**

Nikmati kemudahan ini sebagai *free benefit* bagi anggota IAI.
Segera aktifkan keanggotaan Anda, atau segera registrasi menjadi
Anggota IAI melalui **iailounge.iaiglobal.or.id**

Bukan anggota IAI ingin akses SAK Online ? Daftarkan diri Anda menjadi
SAK Online *user* melalui **sak.iaiglobal.or.id** dan dapatkan *benefitnya*.



Harga Per User Akun SAK Online: **Rp 1.100.000** (Non Anggota IAI)*

Harga Collective:

- Ⓜ Lebih dari 5 User : **15% Discount** dari harga normal

Corporate Partner:

- Ⓜ 3-5 User : Rp **990.000** /user/tahun
- Ⓜ 6-10 User : Rp **957.000** /user/tahun
- Ⓜ Lebih dari 10 User : Rp **935.000** /user/tahun



 **fazri.reza@iaiglobal.or.id /
gerai@iaiglobal.or.id**

Unduh segera Aplikasi
SAK Online melalui:



*Akses **SAK online** ini berlaku per user selama **1 tahun** dan digunakan pada **1 device dan 1 desktop**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INDONESIA SUSTAINABILITY REPORTING FORUM

**Building a Credible, Impactful, and Resilient
Sustainability Ecosystem for Indonesia**



More info:

<https://web.iaiglobal.or.id/keberlanjutan/isrf>



Link Pendaftaran:

<https://bit.ly/Join-ISRF>

SEE BEYOND THE NUMBERS

BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

WA Official IAI
08 111 055 141



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



Fanpage:
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)